SINERGI

BULETIN BPIW

KEMENTERIAN PUPR
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

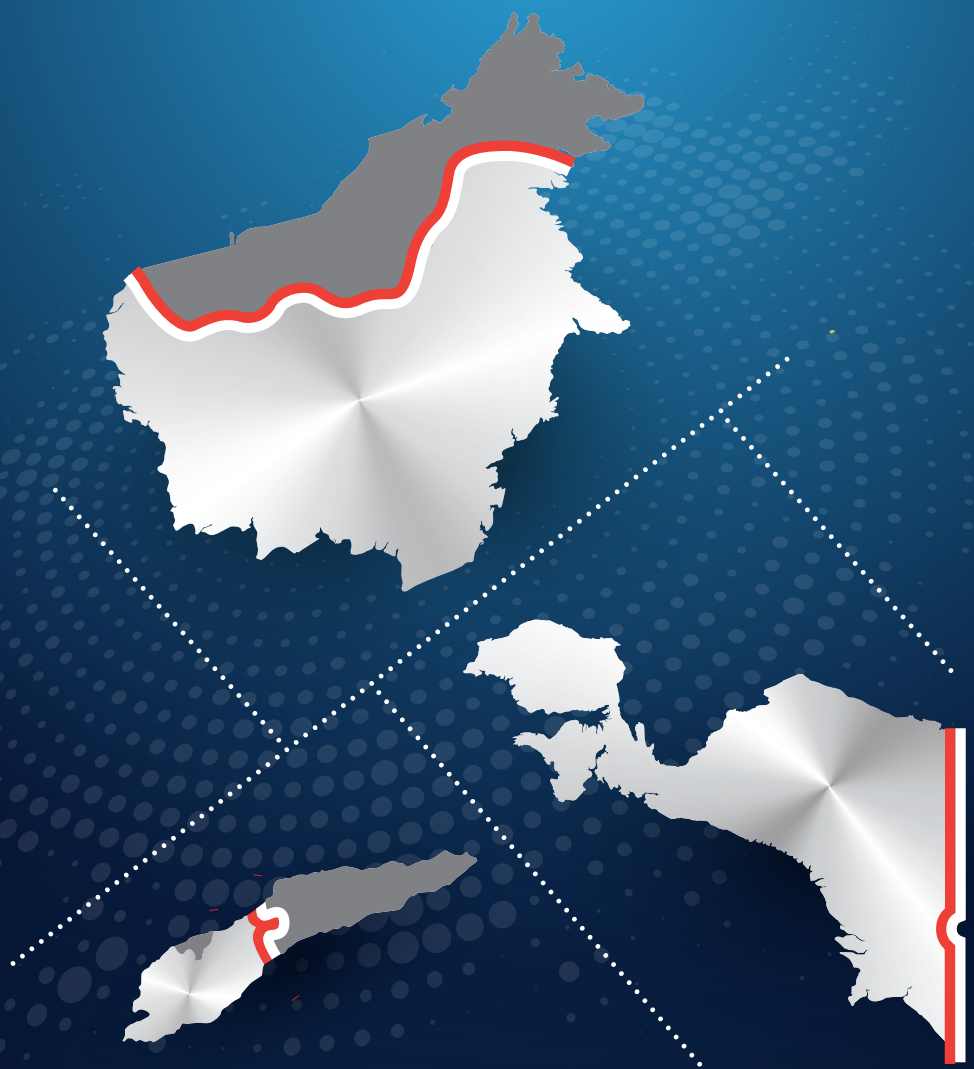

Membangun Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Meningkatkan Daya Saing Indonesia

Susun MPDP, Upaya Akselerasi Wujudkan Kota Baru Sorong

Kuatkan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan dan KTI

www.bpiw.pu.go.id

Edisi 19/ Juli 2017

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
Telp. +6221-2751 5804

www.bpiw.pu.go.id @informasiBPIW @informasiBPIW Layanan Informasi BPIW BPIWkementerianPUPR

SINERGI
BULETIN BPIW

Pelindung:
Rido Matari Ichwan

Penasehat:
Firman Hatorangan

Pengarah:
Bobby Prabowo
Iwan Nurwanto
Hadi Sucahyono
Agusta Ersada Sinulingga

Pemimpin Redaksi:
P. Yudantoro

Redaktur Pelaksana:
Shoviah

Redaksi:
M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadhi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Marpaung

Editor :
Hendra Djamal

Kontributor:
Mutri Batul Aini
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah
Andhika Prabowo

Diterbitkan oleh:
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:
Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
humasbpiw@pu.go.id
Website: www.bpiw.pu.go.id
Twitter: @informasiBPIW
Youtube: Layanan informasi BPIW
Facebook: BPIWkementerianPUPR
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com

Design : Heri Hito
Kartunis: Muhammad Nadjib

SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan Juli ini kami akan menfokuskan pada tema percepatan pembangunan infrastruktur PUPR di perbatasan. Hal itu dibahas mendalam di rubrik Kabar Utama. Untuk laporan khusus dibahas mengenai pengembangan Kota Sorong di Provinsi Papua Barat.

Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan akan dikupas pada rubrik Wawancara bersama Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan Juli, melalui rubrik Kilas BPIW. Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan jalan di kawasan wisata Labuan Bajo.

Kemudian dalam rubrik Tips dibahas mengenai cara berolahraga ringan di kantor. Pada rubrik Glossary menampilkan istilah tentang Wilayah Negara. Kami berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

daftar isi

Edisi 19 - Juli 2017

01 SALAM REDAKSI

02 DAFTAR ISI

03 PERSPEKTIF
Kuatkan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan dan KTI

04 KABAR UTAMA
Membangun Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Meningkatkan Daya Saing Indonesia

10 REVIEW
Memotret Pengembangan Kawasan Perbatasan di Indonesia

11 GLOSSARY
Istilah Tentang Wilayah Negara

12 WAWANCARA
Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT: Menata Perkotaan Melalui Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan*

18 TEROPONG MEDIA
Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

21 KILAS BPIW
Infrastruktur Tingkatkan Pertahanan dan Keamanan Nasional

36 LAPORAN KHUSUS
Susun MPDP, Upaya Akselerasi Wujudkan Kota Baru Sorong

40 OPINI
Meningkatkan dan Menyempurnakan Mutu BPIW, #bpiwbersinergi

46 JALAN-JALAN
Melukis Keindahan Pulau di Labuan Bajo

50 TEKNOLOGI
Pompa Air Tenaga Hidro (PATH)

52 POTRET
Komisi V DPR Kunjungi Pembangunan Anjungan Cerdas

60 TOKOH
Fary Djemy Francis:
Dukung Pembangunan Infrastruktur Pendongkrak Ekonomi Masyarakat

Kuatkan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Perbatasaan dan KTI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) terus melakukan pembangunan infrastruktur PUPR berlandaskan pada Nawacita.

Salah satunya membangun dari pinggiran, seperti membangun kawasan perbatasan. Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, maka pengembangan kawasan perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* (orientasi pembangunan melihat kondisi dalam negeri,red) menjadi *outward looking* (orientasi pembangunan dengan melihat kondisi yang ada di luar negeri,red).
Dengan demikian kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai "pintu gerbang" aktivitas ekonomi dan perdagangan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain.

Beberapa kawasan di Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan negara lain, seperti Entikong (Kalimantan Barat), Aruk (Kalimantan Barat), Badau (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara). Kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Kemudian daerah di NTT seperti Motaain, Motamasin, dan Wini, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Selain itu ada daerah Skouw yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Dengan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur, diharapkan kawasan perbatasan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kualitas 7 Pos Lintas Batas Negera (PLBN) yang dibangun berkualitas internasional dengan didukung infrastruktur di sekitar kawasan perbatasan yang tidak kalah dengan negara tetangga.

Ketujuh PLBN itu adalah PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong. Sedangkan di Papua ada di Skouw.

Hal lain yang dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur adalah pengembangan Kota Baru Publik Sorong yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Langkah tersebut juga bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi disparitas pembangunan antara KTI dan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Dalam pengembangan Kota Baru Publik Sorong dilakukan upaya mengurangi risiko bencana alam melalui pengembangan di lokasi baru yang lebih aman. Hal tersbut juga merupakan langkah antisipasi terhadap kebutuhan permukiman dari dampak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Kota Baru Sorong hadir untuk memenuhi kebutuhan kawasan pemukiman yang aman, nyaman dan layak huni serta mendorong prinsip integrasi dalam pengembangan Kota Baru Sorong sebagai kawasan pengembangan ekonomi baru di Kawasan Indonesia Timur.(**)

Membangun Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Meningkatkan Daya Saing Indonesia

Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) berlandaskan pada Nawacita. Salah satunya adalah membangun dari pinggiran, seperti membangun kawasan perbatasan. Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, maka pengembangan kawasan perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking (orientasi pembangunan melihat kondisi dalam negeri,red) menjadi outward looking (orientasi pembangunan dengan melihat kondisi yang ada di luar negeri,red). Dengan demikian kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai "pintu gerbang" aktivitas ekonomi dan perdagangan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain NTT

Sumber: Dok. PUPR

Bendungan Raknamo NTT

Sumber: Dok. PUPR

Beberapa kawasan di Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan negara lain, seperti Entikong (Kalimantan Barat), Aruk (Kalimantan Barat), Badau (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara). Kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Kemudian daerah di NTT seperti Motaain, Motamasin, dan Wini, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Selain itu ada daerah Skouw yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Dengan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur, diharapkan kawasan perbatasan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kualitas 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun Kementerian PUPR diharapkan juga berkualitas internasional dengan didukung infrastruktur di sekitar kawasan perbatasan yang tidak kalah dengan negara tetangga.

Ketujuh PLBN itu adalah PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong. Kemudian di Papua ada PLBN di Skouw

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, instansinya juga berupaya untuk mengurangi disparitas antara wilayah dengan merekonstruksi PLBN tersebut.

Pembangunan 7 PLBN dan penataan kawasan disekitarnya sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (*security*) dan peningkatan kesejahteraan (*prosperity*).

Selain merenovasi bangunan utama dan pendukung yang ada di kawasan PLBN, pemerintah juga akan menata kawasan pemukiman, sanitasi dan membangun pasar sebagai sentra perputaran ekonomi lokal.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam tempat terpisah menjelaskan, sasaran strategis Kementerian PUPR untuk kawasan perbatasan, terpencil, dan pulau terluar ada beberapa hal. Pertama, Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km (Kawasan Perbatasan Kalimantan, penuntasan *missing link* di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua).

Sasaran strategis kedua, pengentasan permukiman kumuh perkotaan. Selain itu Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan dan dan pulau-

Kualitas 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun Kementerian PUPR diharapkan juga berkualitas internasional dengan didukung infrastruktur di sekitar kawasan perbatasan yang tidak kalah dengan negara tetangga.

"Pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan yang kami prioritaskan saat ini Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur," kata Basuki.

pulau kecil terluar. Sasaran strategis Kementerian PUPR yang ketiga adalah Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pendukung sebanyak 50.000 unit.

Pembangunan infrastruktur PUPR selalu berbasis wilayah pengembangan strategis (WPS), termasuk juga pembangunan di kawasan perbatasan yang merupakan wilayah pertumbuhan yang mencakup 4 WPS, yakni WPS 19 Kupang-Atambua, WPS 21 Temajuk-Sebatik, WPS 23 Balikpapan-Samarinda-Maloy, dan WPS 34 Jayapura-Merauke.

Dalam *Development Plan* 2015-2019, terdapat beberapa pembangunan infrastruktur PUPR di WPS 19 Kupang-Atambua seperti Pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang (2015), Pembangunan Jalan Motaain- Haliwen SP Sadi - Asumanu-Haekesak Turiskain (2017), dan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Perbatasan di Molos Oan Kab. Belu (2017).

Kemudian pada WPS 21 Temajuk-Sebatik, beberapa program yang dilaksanakan seperti Pelebaran Jalan Nanga Badau (2017), Pengembangan Infrastruktur Permukiman Long Apari Kab. Mahakam Ulu (2017), dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kabupaten Landas (2018).

Untuk WPS 23 Balikpapan-Samarinda-Maloy beberapa program infrastruktur di kawasan tersebut diantaranya Pembangunan Bendungan Marangkayu, Kab.Kukar (2015), Pembangunan Rumah Susun Pekerja dan Nelayan di Loktuan Kec. Bontang Utara, serta Pembangunan Jembatan Sei Manggar (2015-2017).

Sedangkan untuk WPS 34 Jayapura-Merauke, beberapa program pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan SPAM Kabupaten Merauke, Preservasi Rekonstruksi Jalan Oksibil- Seredala (2017) dan Pengendalian Banjir Sungai Siborgonyi Kota Jayapura (2017).

"Kawasan perbatasan tidak hanya sebagai kawasan yang membutuhkan dukungan infrastruktur tetapi lebih sebagai wilayah pertumbuhan baru, yang mampu menjadi *leverage* atau pengungkit bagi pembangunan di kawasan sekitarnya," tutur Rido. Pembangunan kawasan perbatasan menurut Rido dihadapkan beberapa tantangan. Pertama, tantangan berupa keterisolasian kawasan. Dengan masih ada kawasan yang terisolir, maka menyebabkan sulitnya pergerakan barang dan jasa (logistik), khususnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sehingga biaya logistik menjadi tinggi dibandingkan di wilayah lain.

Tantangan kedua, yakni terkait penyelesaian

dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen kawasan perbatasan. Tantangan ketiga adalah upaya peningkatan pengawasan di kawasan perbatasan. Kemudian tantangan keempat adalah perlu diefektifkannya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Tantangan kelima, terbatasanya pendanaan karena terlalu banyaknya lokasi kawasan perbatasan yang harus ditangani, sedangkan kemampuan pendanaan pemerintah terbatas.

Untuk menghadapi tantangan tersebut menurut Rido perlu dilakukan perencanaan yang terpadu antara pembangunan infrastruktur dengan kawasan strategis. "Kementerian PUPR menerapkan keterpaduan perencanaan melalui pengembangan berbasis WPS yang merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan *market driven*," ungkap Rido.

Pembangunan infrastruktur berbasis WPS ini mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dan fokus kepada pengembangan infrastruktur di daerah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas regional dan mendukung pengembangan Infrastruktur berkelanjutan.
Upaya dalam membuka keterisolasian kawasan perbatasan kata Rido, dilakukan dengan pembangunan jaringan jalan dengan kawasan lainnya di tanah air serta dengan negara tetangga. Untuk itu pembangunan PLBN dilakukan secara menyeluruh dengan berbagai bangunan pendukung fungsi PLBN, termasuk dengan menerapkan teknologi yang lebih modern, misalnya untuk pemeriksaan kargo dan pemeriksaan imigrasi.

Terkait konektivitas, beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan dan Akses/Menuju Perbatasan. Hingga April 2016, dari total panjang Jalan Paralel Perbatasan sepanjang 2.100,81 Km, yang sudah tersambung adalah sepanjang 1.397,51 Km dan yang belum tersambung adalah sepanjang 702,3 Km. Selain itu, dari total panjang Jalan Akses/Menuju Perbatasan sepanjang 493.1 Km, yang sudah tersambung adalah sepanjang 390,22 Km dan yang belum tersambung adalah sepanjang 102,88 Km.

Pembangunan PLBN di Aruk, Entikong dan Nangabadau, yang berfungsi sebagai pintu gerbang lintas negara Indonesia (Kalimantan) dengan Malaysia. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah membangun Bangunan Utama PLBN (Kantor Imigrasi), Bangunan Pemeriksaan Kargo, Jembatan Timbang, Wisma Pegawai, Klinik, Masjid, Wisma Indonesia, Monumen, TPST, Area Parkir.
Untuk perbatasan NTT (Indonesia) dengan Timor

Pembangunan infrastruktur berbasis WPS ini mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dan fokus kepada pengembangan infrastruktur di daerah strategis

KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 10 PKSN PERBATASAN 2015-2019 [PERBATASAN]

Sumber: Rencana Induk Perbatasan 2015-2019

16 PKSN Tahapan Persiapan Pengembangan

PKSN Perbatasan	PKSN Perbatasan	PKSN Perbatasan	PKSN Perbatasan
Jagoi Babang	Long Pahangai	Tanah Merah	Kalabahi
Jasa	Simanggaris	Dumai	Ilwaki
Long Nawang	Kefamenanu	Batam	Dobo
Long Midang	Merauke	Melonguane	Daruba

Upaya dalam membuka keterisolasian kawasan perbatasan kata Rido, dilakukan dengan pembangunan jaringan jalan dengan kawasan lainnya di tanah air serta dengan negara tetangga.

Leste, hingga April 2016, pembangunan jalan perbatasan yang sudah tersambung adalah sepanjang 43 Km. Sedangkan terkait perbatasan Papua (Indonesia) dengan Papua Nugini, jalan perbatasan di Papua dibagi menjadi 3 ruas, yaitu Jayapura-Abepura-Arso-Waris-Yetti, Yetti-Ubrub-Oksibil, dan Oksibil-Merauke.

Ruas Jayapura-Abepura-Arso-Waris memiliki total panjang jalan 133,34 Km, jalan di ruas ini seluruhnya sudah tersambung. Ruas Yetti-Ubrub-Oksibil memiliki total panjang jalan 301,74 Km, dimana yang sudah tersambung adalah sepanjang 63,24 Km dan yang belum tersambung sepanjang 238,50 Km. Ruas Oksibil-Merauke memiliki total panjang jalan 670 Km, dimana yang sudah tersambung adalah sepanjang 604 Km dan yang belum tersambung sepanjang 66 Km.

Pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan perbatasan dilakukan secara bertahap (*multi years*). Hal ini untuk mengantisipasi terbatasnya anggaran pemerintah. Dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan metode *design-build* yaitu membangun kawasan perbatasan bersamaan dengan menyiapkan desain kawasan perbatasan yang komprehensif. "Melalui konsep perencanaan dengan metode *design-build*, kita dapat menyiapkan wilayah dan kawasan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi," ucap Rido. Pengembangan kawasan perbatasan pada prinsipnya dilakukan berdasarkan 3 arahan kebijakan nasional, yaitu pertama, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, pembangunan kawasan tersebut juga dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, termasuk pulau-pulau kecil dan pulau terluar.

Arahan kebijakan nasional yang kedua yakni Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan agenda Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, terutama terkait pembangunan di daerah pinggiran. Hal ini menegaskan bahwa pengembangan kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah dan juga menjadi arah pembangunan nasional. Kemudian arahan kebijakan nasional yang ketiga adalah, Peraturan Menteri PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR. Dalam Renstra Kementerian PUPR tersebut diamanatkan untuk membangun infrastruktur di tanah air, termasuk di kawasan perbatasan.

Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan

dengan terpadu melalui koordinasi internal Kementerian PUPR (Bina Marga, Jalan, SDA, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan) dan koordinasi eksternal dengan kementerian maupun lembaga lain, termasuk dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Keterpaduan pembangunan tersebut juga dilakukan terhadap pengembangan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan. Kesepuluh PKSN itu adalah Sabang, Ranai, Paloh-Aruk, Entikong, Nunukan, Tahuna, Nanga Badau, Atambua, Saumlaki, dan Jayapura.

Dengan pengembangan kawasan perbatasan, diharapkan dapat meningkatnya kualitas kawasan perbatasan negara (termasuk PLBN), melalui pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan penyediaan infrastruktur dalam rangka mengatasi keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Dengan pengembangan kawasan perbatasan diharapkan penetapan dan penegasan batas wilayah negara dapat diselesaikan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan pertahanan keamanan dan penegakan hukum, demi semakin tegaknya keutuhan wilayah Indonesia.

Disamping itu, pembangunan kawasan perbatasan dapat meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola perbatasan negara melalui penataan dan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola perbatasan yang moderen, efektif dan efisien, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dinamika regional dan global.

Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Laut

Pulau terluar merupakan perbatasan laut Indonesia dengan negara lain. Terkait dengan hal itu, BPIW mengacu pada daftar pulau-pulau kecil terluar yang berada dalam Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang saat ini sedang disiapkan revisinya tahun 2016.

Pada prinsipnya pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan. Pembangunan pulau-pulau terluar dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, pembangunan pulau-pulau tersebut untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Beberapa pulau terluar yang menjadi perhatian Kementerian PUPR, seperti Pulau Natuna, Anambas, dan Alor. Di pulau-pulau itu terdapat jalan nasional yang terus dilakukan pemeliharaan dan peningkatan jalan.

Pembangunan pulau terluar dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar, seperti infrastruktur perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan dan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Selain itu juga untuk mendukung peran aparat keamanan yang berada di pulau terluar dengan membangun infrastruktur pendukung seperti pos keamanan. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pulau terluar, juga didukung dengan infrastruktur bagi kegiatan nelayan, seperti dermaga kecil dan tambatan perahu.

Pada akhirnya pembangunan kawasan perbatasan menurut Rido diharapkan dapat meningkatkan kualitas fisik kawasan perbatasan, baik perbatasan darat dan laut. Selain itu untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. **Tim Redaksi**

> Dengan pengembangan kawasan perbatasan, diharapkan dapat meningkatnya kualitas kawasan perbatasan negara (termasuk PLBN)

Sumber: PUPR

Memotret Pengembangan Kawasan Perbatasan di Indonesia

Judul Buku	:	Kawasan Strategis Nasional Perbatasan: Meningkatkan Ketertinggalan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman
Pengarang	:	Ary R. Wahyudi, Dinar Suryandari, Mangapul L. Nababan
Penerbit	:	Pusat Kajian Strategis Kementerian PUPR
Tahun Terbit	:	2014
Jumlah Halaman	:	386 halaman

Indonesia telah secara resmi diakui dunia internasional sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau terbanyak. Namun untuk mengukuhkan kedaulatan negara kepulauan ini tidaklah mudah. Banyak kewajiban dan hak yang harus ditunaikan pemerintah. Di antaranya adalah persoalan perbatasan wilayah dengan negara tetangga.

Saat ini kondisi Kawasan Strategis Perbatasan di Indonesia kondisinya sangat memprihatinkan. Mulai dari rendahnya kualitas SDM hingga ketersediaan infrastruktur dasar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berkontribusi dalam proses pembangunan kawasan perbatasan. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam menangani wilayah perbatasan, namun tidak banyak yang mengetahui apa dan bagaimana peran kementerian ini. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada khalayak tentang peran, isu dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Kementerian PUPR.

Pada bab kedua buku ini, dipaparkan mengenai tinjauan produk hukum yang menjadi rujukan dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Masalah isu dan tantangan pembangunan di kawasan perbatasan dibahas di bab ke empat buku ini. Pembaca juga dapat mengetahui kondisi infrastruktur PUPR tahun 2013 dan 2014 dari seluruh provinsi. Terakhir, juga disinggung mengenai dinamika pembiayaan infrastruktur PUPR dari tahun ke tahun.

Buku ini disusun oleh tiga orang yang berlatar belakang pendidikan perencana wilayah, dan telah banyak berkecimpung di Kementerian PUPR dalam menangani program-progam dan kajian pembangunan infrastruktur. **(Mutri)**

> *"Buku ini disusun oleh tiga orang yang berlatar belakang pendidikan perencana wilayah, dan telah banyak berkecimpung di Kementerian PUPR"*

Istilah Tentang Wilayah Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Hal ini termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berikut istilah-istilah wilayah berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disebut juga Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Wilayah Perairan : Perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

Wilayah Yurisdiksi : Wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Batas Wilayah Negara : Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

Batas Wilayah Yurisdiksi : Garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kawasan Perbatasan : Bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

Zona Tambahan Indonesia : Zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia : Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Landas Kontinen Indonesia : Meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.

Menata Perkotaan Melalui Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan*

Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan telah membuat berbagai macam program dan masterplan maupun development plan terkait pengembangan perkotaan dan perdesaan. Tujuan utama dari pelaksanaan program dari Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan itu adalah tersusunnya masterplan dan development plan guna memenuhi target RPJMN 2015 – 2019, sehingga diharapkan pengembangan kota – kota dan kawasan perkotaan di Indonesia dapat lebih terarah dan terencana dengan baik. Seperti apa lengkapnya program terkait perkotaan dan juga perdesaan tersebut. Berikut wawancara Sinergi dengan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT beberapa waktu lalu.

Kegiatan Strategis apa saja yang sudah dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan sepanjang 6 bulan terakhir ini?

Banyak yang sudah dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Misalnya melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, kita telah melakukan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri terkait pengembangan Kota Baru dan Kawasan Perkotaan lainnya yang masuk dalam RPJMN 2015 – 2019.

Salah satu bentuk koordinasi tersebut menghasilkan pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional atau TKPPN yang dikoordinasikan oleh Bappenas untuk keterpaduan dan percepatan pembangunan perkotaan di Indonesia, dimana Kepala BPIW Kementerian PUPR menjadi pengarah, dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menjadi salah satu anggota dalam TKPPN.

Sedangkan Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan atau PIKM telah melakukan 3 Kegiatan Strategis, yaitu, pertama, penyusunan *Masterplan*, *Development Plan*, dan Studi Penetapan Kawasan Metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Kab Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala) di WPS Palangkaraya, Banjarmasin, dan Batulicin. Kemudian yang kedua, Penyusunan Studi Penetapan dan Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Tua Semarang, dan ketiga Penyusunan Arahan Pengembangan dan Kajian Kependudukan Kawasan Pantai Utara Jakarta atau NCICD.

Apa yang menjadi fokus perhatian pusat ini hingga Desember mendatang?

Untuk Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan hingga Desember mendatang yang menjadi fokus utamanya adalah pertama, Menyusun *Masterplan* dan *Development Plan* Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur, serta Menyusun Program Pembangunan Infrastruktur PUPR dengan mempertimbangkan infrastruktur non-PUPR berdasarkan kebutuhan *masterplan* untuk jangka panjang yakni 10-20 tahun. Kemudian, *Development Plan* untuk jangka menengah yakni 5 tahunan, dan program keterpaduan infrastruktur jangka pendek yakni 1 hingga 3 tahun. Selanjutnya dilakukan Menyusun Pra Desain Kawasan Prioritas di Kawasan Metropolitan Baru Banjarbakula.

Fokus kedua dari bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan adalah Menyusun Studi Penetapan dan Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Tua Semarang. Fokus ketiga adalah Menyusun Rencana Ruang dan Kependudukan untuk Kawasan Pantai Utara Jakarta.

Sedangkan Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, fokus untuk menyelesaikan penyiapan *Masterplan* dan *Development Plan* di 4 kawasan Kota Baru yakni Palembang, Makassar, Manado, dan Sorong. Bidang ini juga memfokuskan pada penyiapan *Masterplan* dan *Development Plan* di 3 Kawasan Kota Sedang yakni Singkawang, Dumai, dan Tebingtinggi.

Apalagi yang menjadi fokus kegiatan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan?

Fokus lain dari pusat kita, terutama Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru yakni m*ereview Masterplan* dan *Development Plan* Kota Baru Tanjung Selor, penyusunan *Masterplan*

"Banyak yang sudah dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Misalnya melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, kita telah melakukan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri".

Seremoni pelantikan jabatan Sekretaris BPIW

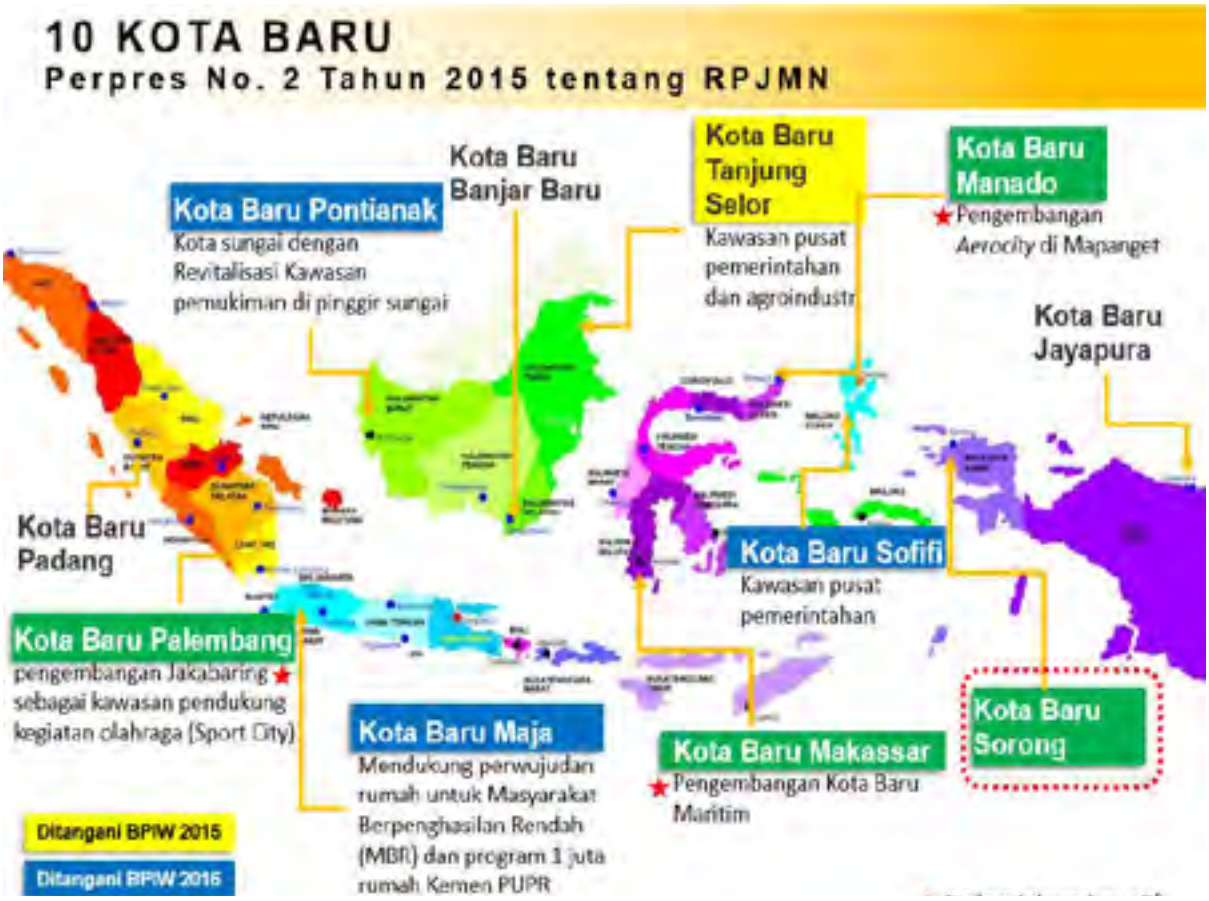

dan *Development Plan* di Kawasan Perkotaan Mendukung Pariwisata Danau Toba, dan Penyusunan *Quick Guide* Implementasi *New Urban Agenda* atau NUA. Kemudian juga Pemantauan Implementasi Keterpaduan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru.

Terkait pengembangan kawasan perdesaan, fokus kegiatan hingga Desember mendatang yaitu menyelesaikan *masterplan, development plan,* dan Pra Desain 10 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional atau KPPN yang sesuai dengan karakteristik potensi dan permasalahan masing-masing kawasan, termasuk di dalamnya menghasilkan matriks program dan juga untuk mengetahui kebutuhan program pembangunan pada tahun 2019 – 2023, khususnya pembangunan infrastruktur ke-PUPR-an.

Bagaimana progres terakhir dari Kota Baru Publik Maja setelah MoU ditandatangani tahun 2016 lalu?

Progres pengembangan Kota Baru Publik Maja hingga saat ini, yakni sedang disiapkan lahan untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR oleh para pengembang. Selanjutnya, penyusunan *Feasibility Study* atau Studi Kelayakan dan penyusunan *Detail Engineering Design* atau DED Jalan akses Kota Baru Maja oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Progres lainnya yakni Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat telah melakukan fasilitasi koordinasi pengadaan dan pengurusan perizinan lokasi kawasan hunian.

Daerah mana lagi yang akan dikembangkan sebagai kota baru publik?

> "Untuk tahun 2017 ini, *masterplan* dan *development plan* yang disusun adalah untuk metropolitan baru Banjarbakula di Banjarmasin Kalimantan Selatan".

Pada tahun 2018 direncanakan Penyusunan *masterplan* dan *development plan* Kota Baru untuk Kota Banjarbaru, dan Kota Padang. Sedangkan pada tahun 2019 direncanakan untuk Penyusunan MPDP Kota Jayapura.

Bagaimana pula dengan progres program pengembangan kawasan Metropolitan sampai saat ini?

Pada tahun 2015, bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan telah menyelesaikan *masterplan* dan *development plan,* tujuh kawasan metropolitan yaitu Metropolitan Mebidangro, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Mamminasata dan Sarbagita. Selanjutnya tahun 2016, selain penyusunan rencana kawasan prioritas di 7 kawasan metropolitan sebelumnya disusun juga *masterplan* dan *development plan* pada kawasan metropolitan baru sesuai dengan Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu metropolitan baru Palembang Raya dan Metropolian baru Bimindo (di Manado).

Untuk tahun 2017 ini, *masterplan* dan *development plan* yang disusun adalah untuk metropolitan baru Banjarbakula di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sehinga untuk kedepannya bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan masih menyelesaikan *masterplan* dan *development plan* untuk metropolitan baru Palapa di Padang dan Mataram Raya.

Dari *masterplan* dan *development plan* kawasan metropolitan yang sudah disusun tahun lalu, kawasan metropolitan mana yang mulai terlihat pertumbuhannya?

Secara umum, metropolitan adalah aglomerasi dari pusat pertumbuhan sehingga memang pertumbuhan pada kawasan akan berpusat di metropolitan. Sebagiai contoh Metropolitan Jabodetabek dengan pertumbuhan ekonomi 5,8% di tahun 2017 berkontribusi sebesar 17% dari perkonomian nasional. Sedangkan untuk *masterplan* dan *development plan* metropolitan baru yang disusun tahun 2016, maka Palembang Raya memiliki kecenderungan tumbuh lebih cepat dengan pembanguna *Light Rail Transit* atau LRT dan penyelenggaraan Asian Games di tahun 2018.

Untuk program pengembangan kawasan perdesaan, apa yang saat ini sedang dilakukan?

Pada tahun 2017 ini, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan menyusun *masterplan* dan pra desain KPPN sebanyak 10 lokasi. BPIW sudah mengundang 10 Bappeda dalam rangka *kick off* terkait hal itu.

Bappeda yang diundang di lokasi KPPN itu seperti KPPN Sidikalang yang terletak di Kab. Toba Samosir dan Kab. Pak Pak Bharat, KPPN Baturaja di Kab. Empat Lawang, KPPN Marabahan di Kab. Banjar, KPPN Rasau Jaya di Kab. Mempawah, KPPN Tanjung Redeb di Kab. Berau, KPPN Kolonedale di Kab. Luwuk Timur dan Kab. Morowali, KPPN Barru di Kab. Sidenreng Rappang, serta KPPN Raba di Kab. Dompu.

Seperti apa tahapan penyusunan *masterplan* dan pra desainnya?

Penyusunan *masterplan* dan pra desain tersebut melewati beberapa tahapan. Tahapan pertama, yakni *kick off* dengan mengundang 10 Bappeda tadi. *Kick off* bertujuan untuk sosialisasi mengenai penyusunan *masterplan* dan pra desain serta identifikasi awal potensi dan permasalahan yang ada di lokasi KPPN tersebut.

Kemudian tahapan kedua adalah survei pertama yang diawali dengan rapat koordinasi dengan mengundang perwakilan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD serta perangkat desa yang masuk kedalam zonasi KPPN. Tahapan ketiga adalah setelah mengolah serta menganalisis data – data yang didapatkan pada survei pertama, dilakukan survei kedua yang bertujuan untuk melihat kawasan yang berpotensi menjadi kawasan prioritas yang akan dijadikan pusat pengembangan di KPPN tersebut.

Tahapan keempat adalah diskusi tingkat daerah dengan mengundang SKPD serta perangkat desa dan perwakilan kementerian dan lembaga pusat untuk memberikan masukan terhadap dokumen *masterplan* yang telah disusun oleh tim penyusun. Tahapan terakhir adalah seminar yang mengundang Bappeda di 10 lokasi KPPN tersebut untuk memaparkan hasil akhir dari dokumen masterplan yang telah selesai disusun.

***Masterplan* dan Pra DED yang telah disusun terhadap 40 KPPN, seperti apa realisasinya sampai saat ini?**

Kementerian PUPR dalam hal ini diwakili oleh BPIW bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menyusun 40 *masterplan* di lokasi KPPN. Pada tahun 2016 telah selesai disusun 10 *masterplan* yang dalam hal ini BPIW menyusun 4 *masterplan* yang berlokasi di KPPN Labuan Bajo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Tabanan di Kabupaten Tabanan, Praya di Kabupaten Lombok Timur, dan KPPN Daruba di Kabupaten Kepulauan Morotai.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Oleh sebab itu pada tahun 2017, matriks program yang telah dihasilkan dari dokumen *masterplan* tersebut didiskusikan didalam forum Konsultasi Regional Kementerian PUPR dengan tujuan untuk koordinasi dan sinkronisasi program tahunan sebagai salah satu tahapan penyiapan program yang diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya pembangunan Bidang PUPR yang dimiliki Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah.

"Untuk *masterplan* dan *development plan* metropolitan baru yang disusun tahun 2016, maka Palembang Raya memiliki kecenderungan tumbuh lebih cepat dengan pembanguna *Light Rail Transit* atau LRT dan penyelenggaraan Asian Games di tahun 2018".

"Pada tahun 2017 ini, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan menyusun masterplan dan pra desain KPPN sebanyak 10 lokasi".

Adakah evaluasi yang dilakukan oleh Pusat ini untuk melihat efektifitas *masterplan* dan *development plan* yang telah disusun terhadap pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan?

Dalam rangka evaluasi terhadap pengembangan Kawasan Metropolitan di tahun ini dilakukan kegiatan Keterpaduan Program Infrastruktur Kawasan Metropolitan. Didalam kegiatan tersebut dilakukan identifikasi dan inventarisasi rencana pengembangan regional dan rencana pengembangan infrastruktur wilayah Kawasan Metropolitan serta identifikasi kondisi eksisting regional kawasan dan kondisi eksisting infrastruktur wilayah Kawasan Metropolitan.

Untuk selanjutnya dilakukan analisis *gap* antara kondisi eksisting regional kawasan dengan rencana perkembangan regional wilayah Kawasan Metropolitan serta *gap* antara kondisi eksisting infrastruktur dan rencana infrastruktur Kawasan Metropolitan. Dari kegiatan ini diharapkan keterpaduan perkembangan regional dan perkembangan infrastruktur Kawasan Metropolitan, khususnya infrastruktur bidang PUPR dapat dipantau dan dievaluasi dengan baik.

Bentuk evaluasi yang kita lakukan dalam melihat efektifitas *masterplan* dan *development plan* yaitu dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap implementasi pengembangan infrastruktur PUPR pada kawasan kota baru dan kawasan perkotaan lainnya yang telah disusun *masterplan* dan *development plan*, serta melakukan koordinasi dengan Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR untuk sinkronisasi program – program di Kawasan Kota Baru dan Kawasan Perkotaan lainnya yang sudah disusun *masterplan* dan *development plan*nya.

Apa yang menjadi acuan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dalam penyusunan *masterplan* dan *development plan*?

Dalam penyusunan *masterplan* dan *development plan* acuan dari pusat pengembangan kawasan perkotaan berupa Petunjuk Pelaksanaan Nomor DSM/Wk/PP/01 tentang Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Kawasan Perkotaan. Dokumen tersebut menjadi *guideline* agar keluaran *masterplan* dan *development plan* sesuai dengan rencana awal yang tersusun dalam kerangka acuan kerja.

Pada tahun berikutnya dokumen tersebut digunakan untuk mengevaluasi keluaran *masterplan* dan *development plan* yang dilaksanakan dalam kegiatan Standar Manajemen Mutu atau SMM. Setelah *masterplan* dan *development plan* tersusun, pusat mengevaluasi efektifitas *masterplan* dan *development plan* tersebut dengan ikut serta dalam sinkronisasi program bersama pusat pemrograman untuk mengetahui sejauh mana program dapat diimplementasikan.

Untuk program pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan, apakah sudah banyak kota – kota di Indonesia menerapkannya? Mengapa demikian?

Pada tahun 2016 ada 8 kota yang mengikuti program Kota Kompak Cerdas yaitu Kota Banda Aceh, Padang, Salatiga, Trenggalek, Baubau, Gorontalo, Banjarmasin, dan Ambon. Dari jumlah tersebut, ada 4 kota yang akan menerapkan konsep pengembangan pada tahun 2018 – 2019 melalui kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Publik atau RTP sebagai salah satu atribut Kota Cerdas Berkelanjutan yaitu Kota Padang, Salatiga, Gorontalo, dan Baubau.

Bagaimana caranya agar pihak swasta tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, terutama dalam membangun hunian?

Dalam mengendalikan pihak swasta agar memperhatikan MBR dalam membangun hunian, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan telah

"Dalam penyusunan *masterplan* dan *development* plan terdapat acuan dari pusat pengembangan kawasan perkotaan berupa Petunjuk Pelaksanaan Nomor DSM/Wk/PP/01 tentang Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Kawasan Perkotaan."

bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah selaku pemberi ijin lokasi dan ijin membangun untuk mengatur konsep hunian berimbang yakni 1 : 2 : 3. Konsep ini diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu Kementerian PUPR mendukung hunian MBR melalui pembangunan rusunawa, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Fasilitas ini untuk MBR. Kementerian PUPR juga mendukung sarana dan prasarana dasar seperti air minum, dan jalan lingkungan.

Bagaimana caranya agar *public space* atau tempat umum dan juga ruang terbuka hijau atau RTH tetap terjamin keberadaannya dalam pengembangan perkotaan?

Kunci utama agar *public space* dan RTH tetap terjamin keberadaannya adalah dengan penegakan hukum yang tegas terutama terhadap pelanggaran pemanfaatannya dan juga peran serta masyarakat perlu dilibatkan. Penegakan hukum ini penting untuk dilakukan mengingat didalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menetapkan setiap wilayah kota harus menyediakan RTH sebesar 30% dari luas wilayah.

Keikutsertaan masyarakat dalam memelihara *public space* dan RTH masih rendah, dikarenakan sebagian masyarakat sering menyerobot lokasi tersebut untuk kepentingan lain, misalnya dipergunakan sebagai tempat untuk berdagang. Akibatnya banyak tanaman yang mati dan lingkungan di sekitarnyapun menjadi kotor oleh sampah. Adapun solusi terhadap masalah tersebut yakni menata ulang dari segi perencanaan dan teknis untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Sehubungan dengan hal itu, pusat kita telah berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya dan Kementerian ATR/BPN terkait pengendalian RTH dan Pengembangan Infrastruktur yang ada RTH tersebut.

Apa tantangan terbesar pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di Indonesia dan bagaimana solusi menghadapi tantangan tersebut?

Tantangan pembangunan kawasan perkotaan metropolitan ada 3 hal. Pertama, tidak meratanya perkembangan ekonomi, dimana perkembangan kota inti yang relatif lebih cepat sedangkan kota *periphery* tidak cukup mampu mengimbangi perkembangan kota inti. Tantangan kedua adalah disparitas antar wilayah, dimana dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dikawasan perkotaan dan penyedian prasarana sarana perkotaan memicu juga tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan. Tantangan yang ketiga adalah perkembangan infrastruktur jalan yang belum menjangkau pusat-pusat permukiman serta permasalahan lingkungan yang tidak terkoordinasi pemanaatan ruangnya juga merupakan tantangan bagi pengembangan perkotaan.

Tantangan pengembangan Infrastruktur di kawasan perkotaan adalah dalam hal pendanaan, dimana kemampuan pendanaan pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD hanya berkisar 30 – 40 % dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Untuk itu perlu dikembangkan kerjasama pembiayaan infrastruktur dengan berbagai pihak seperti BUMN, swasta, dan masyarakat untuk dapat mempercepat pembangunan di kawasan perkotaan.

Selain itu tantangan terkait keterbatasan lahan di kawasan perkotaan dan tingginya harga lahan sehingga sulit untuk dibebaskan. Untuk itu perlu ada komitmen pemerintah daerah untuk melakukan *Land Banking* atau Bank Tanah untuk penyediaan infrastruktur di kawasan perkotaan.

Saat ini kita juga gencar melakukan koordinasi dengan unor-unor di lingkungan kementerian PUPR maupun kementerian maupun lembaga terkait bahwa program pengembangan KPPN perlu dimasukan ke dalam prioritas untuk mendapatkan dukungan infrastruktur yang didanai oleh APBN.

Tantangan lainnya adalah infrastruktur kawasan perdesaan pada dasarnya tipikal dengan kawasan perkotaan. Namun skala infrastruktur yang perlu dibangun banyak yang tergolong ke dalam kewenangan daerah sementara daerah pun telah memiliki program tersendiri. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan SKPD setempat terkait pengembangan KPPN di wilayahnya untuk mendapat dukungan infrastruktur yang didanai oleh APBD.

Apa tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program dari Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan sepanjang tahun ini?

Tujuan dari penyusunan *masterplan* dan *development plan* kawasan metropolitan adalah untuk memberikan dukungan infrastruktur PUPR dalam rangka meningkatkan Kawasan Metropolitan dan sekitarnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional atau PKN yang terintegrasi dengan infrastruktur strategis non-PUPRdengan wilayah pengaruhnya atau *hinterland*, kota-kota di sekitarnya sehingga memperkuat sistem perkotaan, serta sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama dalam Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan dapat diimplementasikan melalui dukungan infrastruktur PUPR agar menjadi acuan bagi sektor PUPR untuk mengarahkan pertumbuhan kotanya dan dalam mengembangkan Kawasan secara terpadu.

Tujuan utama dari pelaksanaan program Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan adalah tersusunnya *masterplan* dan *development plan* guna memenuhi target RPJMN 2015 – 2019, sehingga diharapkan pengembangan kota – kota dan kawasan perkotaan di Indonesia dapat lebih terarah dan terencana dengan baik.

Penyusunan *masterplan* dan Pra DED sedikitnya pada 40 lokasi KPPN merupakan upaya mewujudkan Nawacita Presiden, yaitu pada poin 3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kita berusaha juga mewujudkan poin 5 Nawacita yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Selain itu juga diupayakan mewujukan Nawacita poin 6 yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta poin 7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.

> "Tujuan dari penyusunan *masterplan* dan *development plan* kawasan metropolitan adalah untuk memberikan dukungan infrastruktur PUPR dalam rangka meningkatkan Kawasan Metropolitan dan sekitarnya"

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu,dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah 2 potongan pemberitaan tersebut.

Bappenas: Dana Jangka Panjang Banjiri Proyek Infrastruktur

▶ JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemilik dana-dana jangka panjang internasional menginginkan dananya ditempatkan pada proyek infrastruktur di Indonesia. Hal ini didorong oleh semakin prospektifnya perekonomian nasional dan diperolehnya peringkat layak investasi.

"Indonesia berusaha agar dana-dana jangka panjang internasional bisa diinvestasikan di proyek strategis nasional (PSN). Keberadaan dana-dana jangka panjang tersebut sangat vital dan dapat menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur yang selama ini bersumber dari APBN, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan menutupi ketimpangan ekonomi antardaerah," kata Bambang, di Jakarta, Selasa (11/7).

Dalam kunjungan KTT G-20 di Hamburg, Jerman, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan kepada jajaran menterinya untuk kian agresif menawarkan proyek infrastruktur di Indonesia dengan memanfaatkan status investment grade. Instruksi tersebut merupakan upaya Indonesia mencari investasi senilai US$ 10 miliar untuk membiayai proyek pembangkit listrik, jalan tol, dan proyek infrastruktur lainnya.

Dalam rangka menggaet dana-dana jangka panjang internasional, menurut Bambang, pemerintah Indonesia [illegible] pembiayaan non-anggaran pemerintah (PINA). Presiden juga menekankan bahwa model pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari non-anggaran pemerintah harus digenjot. Indonesia perlu melakukan terobosan jika tidak ingin tertinggal dengan negara lain yang sudah menggunakan skema pembiayaan pembangunan dari non-anggaran pemerintah.

Ketertarikan dana-dana jangka panjang terlihat dari hasil kunjungan Bambang Brodjonegoro ke lima kota di Australia, 18-23 Juni 2017. Salah satu ketertarikan itu berasal dari investor infrastruktur besar dari Australia yang mengelola dana pensiun dengan asset under management senilai 2,1 triliun dolar Australia. Investor infrastruktur tersebut menunjukkan ketertarikan besar masuk ke infrastruktur Indonesia dengan pola pembiayaan ekuitas, pembiayaan utang, dan obligasi subordinasi (subdebt).

Ke depan, Bambang menambahkan, pihaknya akan menyapa target proyek infrastruktur, yakni Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Negara-negara tersebut memiliki dana-dana jangka panjang, seperti Kanada yang salah satu negara bagiannya, Ontario, memiliki dana pensiun guru senilai sekitar 20 kali dana kelolaan milik BPJS Ketenagakerjaan yang per 2016 sebesar Rp 262 triliun.

Koordinator PINA

Bambang juga menjelaskan, bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada intinya, jelas Bambang, Perpres tersebut menunjuk Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai koordinator PINA dengan melibatkan kementerian-kementerian lain. Menteri PPN/Kepala Bappenas juga dapat mengusulkan perubahan PSN yang bersumber dari non-anggaran pemerintah kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

"Kami menyambut positif keberadaan Perpres No 58 Tahun 2017, hal ini dapat menjadi landasan hukum dalam menentukan peranan Bappenas untuk mengakselerasi pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang bersumber dari non-anggaran pemerintah. Perpres ini turut mendukung PP No 17 Tahun 2017 tentang proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, [illegible] PINA dengan total nilai proyek sebesar US$ 15 miliar atau setara Rp 200 triliun akan terealisasi pada 2017. Berikutnya, ditargetkan ada tambahan 20 proyek PINA dengan total nilai proyek sebesar US$ 30 miliar atau setara Rp 400 triliun bakal terealisasi pada 2018.

Salah satu proyek PINA yang akan ditandatangani bulan depan adalah Bandara Internasional Jawa Barat-Kertajati dengan menggunakan skema reksadana penyertaan tetap (RDPT). Dalam hal ini, RDPT akan dikelola oleh Danareksa Asset Management sekitar Rp 1 triliun dengan advisor PT Sarana Multi Infrastruktur.

Selain itu, PP Energy menerbitkan Surat Berharga Perpetual yang diinisiasi oleh Danareksa Capital seiring dengan telah disetujui penerbitannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perpetual notes adalah sejenis surat berharga tanpa adanya masa jatuh tempo dengan kupon bunga dibayarkan secara periodik dan dapat diperhitungkan dalam ekuitas. "Perusahaan energi terbesar asal Prancis telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia," jelas Bambang.

Menurut rencana, perpetual bond PT PP Energy dapat tuntas diterbitkan pada Agustus 2017. Keberadaan instrumen perpetual bond merupakan terobosan dalam pembiayaan ekuitas di Indonesia dimana instrumen seperti perpetual bond dapat menjembatani antara investasi dana pensiun dalam bentuk ekuitas dan komponen imbal hasil reguler. Instrumen seperti perpetual bond sudah menjadi praktik lazim di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand untuk

Ulasan pertama rubrik Teropong Media edisi 19 ini, terkait berita di Investor Daily di halaman 21, yang diterbitkan pada hari Rabu, 12 Juli 2017. Berita tersebut diberi judul "Bappenas: Dana Jangka Panjang Banjiri Proyek Infrastruktur". Berikut ulasannya:

Keterlibatan Swasta Diperlukan Untuk Memacu Infrastruktur PUPR

Pernyataan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro yang menyatakan bahwa pemilik dana jangka panjang internasional menginginkan dananya ditempatkan pada proyek infrastruktur di Indonesia, karena prospektifnya perekonomian nasional, sangat logis. Pasalnya, memang sejak awal memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo memfokuskan pada pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Sementara dalam kurun waktu tersebut, banyak sasaran pembangunan infrastruktur yang dilakukan sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ada 3 sasaran pembangunan infrastruktur PUPR. Pertama, meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. Terkait hal itu ada beberapa program yang dilakukan seperti pembangunan 65 bendungan (terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan), dan 1 juta ha jaringan irigasi baru.

Sasaran kedua, yakni mendukung konektivitas bagi penguatan daya saing. Untuk urusan ini ada beberapa program yang dilakukan, seperti pembangunan jalan tol (pemerintah dan swasta) sepanjang 1.000 km dan pembangunan jembatan sepanjang 29.859 m. Kemudian, sasaran ketiga yakni infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup. Terkait hal itu beberapa program yang dilakukan seperti peningkatan akses terhadap air minum dari 68,11% menjadi 100% di tahun 2019 dan pembangunan rumah susun bagi MBR sebanyak 555.000 unit.

Untuk melaksanakan banyak program pembangunan infrastruktur, tidak bisa dibebankan pada APBN semata. Pasalnya anggaran negara terbatas. Untuk itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, tapi juga pihak swasta. Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur merupakan hal yang biasa terjadi di negara-negara maju. Swasta tidak hanya berperan sebagai *customer*, namun juga sebagai bagian dari *desainer*, konstruktor, *supervisor* yang mendukung terwujudnya infrastruktur dengan kualitas yang lebih baik.

Di Indonesia, peran swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri ini masih belum optimal. Sektor infrastruktur yang padat modal dengan risiko yang tinggi dan pengembalian dana yang lama masih belum menjadi daya tarik swasta untuk masuk sebagai investor. Oleh karena itu, regulasi yang lebih pro investor, adanya jaminan pemerintah, iklim usaha yang kondusif, dan stabilitas politik diharapkan dapat memicu investor dari dalam dan luar negeri untuk turut berperan dalam pembangunan infrastruktur.

Ada 2 skema kerja sama pemerintah dan swasta yang saat ini sedang dikembangkan dalam mendukung penyediaan infrastruktur. Pertama, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kerja sama yang disebut juga *Public Private Partnership* (PPP) ini merupakan bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah dengan mitra swasta. Dalam melakukan kerja sama ini, risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dibagi kepada pemerintah dan swasta.

Terminologi KPBU di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden RI No. 67 tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang telah beberapa kali diamandemen hingga kemudian lahir Peraturan Presiden RI No. 38 tahun 2015.

Kemudian, skema kedua yakni Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Skema PINA ini merupakan penggalangan sumber pembiayaan alternatif, agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian indonesia. Manfaat PINA antara lain adalah optimalisasi peran BUMN dan swasta dalam pembiayaan pembangunan, peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan, dan percepatan pelaksanaan proyek prioritas.

Skema PINA sebagai alternatif baru yang ditawarkan oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia menitikberatkan pada pembiayaan infrastruktur yang sepenuhnya dipenuhi oleh badan usaha dan pihak swasta tanpa adanya intervensi sedikitpun yang dilakukan oleh pemerintah.

Seperti yang disampaikan Menteri PPN/Bappenas dalam berita tersebut, Presiden juga telah menandatangani Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan adanya Perpres tersebut diharapkan target 10 proyek PINA dengan total nilai proyek sebesar Rp 200 triliun pada tahun 2017, dapat benar-benar tercapai. Dengan skema pembiayaan tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat terus dipacu untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kebut Ketertinggalan Pembangunan Infrastruktur

Bank Dunia menyarankan kerja sama swasta dan BUMN.

Ali Nur Yasin

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketertinggalan pembangunan infrastruktur dibanding negara lain terjadi karena Indonesia mengalami kesulitan di masa lalu. "Bukan kami senang, tapi banyak presiden di masa lalu yang juga mengalami kesulitan," ujarnya kemarin.

Sri Mulyani mengatakan, kesulitan itu di antaranya ketika harus menghadapi krisis ekonomi Asia pada 1998-1999. Saat itu Indonesia mengalami tingkat utang yang sangat besar untuk membangun kembali berbagai layanan sosial para-krisis.

Pemerintah, kata dia, harus melakukan stabilisasi negara, mengembalikan kepercayaan,hingga menguranggi tingkat utang dengan memastikan agar lembaga keuangan negara sehat dan kuat. "Presiden Jokowi memintya dan kami lihat Indonesia lebih stabil, rasio utang dan, PDB stabil, walaupun belum cukup baik," ujarnya.

Sri Mulyani menuturkan, saat ini Indonesia memiliki kesempatan untuk memulihkan dan mengatasi ketertinggalan pembangunan selama 10 tahun terakhir. Hal itu, kata dia, tidak mudah karena itu keberlangsungan dan stabilitas keuangan negara yang harus dijaga. "Sangat penting bagi kita melihatkan sektor swasta dan bagaimana Bank Dunia siap membantu."

Secara khusus, Sri Mulyani meminta Presiden World Bank Group Jim Yong Kim mendorong kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia. Terutama kerja sama untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan dan memastikan pendanaan-nya tak selalu bergantung pada anggaran pemerintah. "Bagaimana kita bisa manfaatkan ruang anggaran yang terbatas tapi bisa melibatkan skema sektor pendanaan yang bisa tarik swasta lebih banyak."

Untuk menarik investor, kata dia, dibutuhkan skema dan struktur pendanaan yang lebih kreatif. Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 245 proyek strategis nasional yang sedang direncanakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. "Saya undang, baik itu BUMN yang sudah siap terlibat. Saya juga tantang swasta, jangan banyak egelah dan datang kepada kami," kata Sri Mulyani.

Menurut dia, ada ruang yang sangat besar untuk bekerja sama dengan pemerintah, yaitu mencapai US$ 200 miliar investasi yang disediakan untuk BUMN dan swasta. Sri Mulyani menyatakan komitmennya untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya pendanaan.

Presiden World Bank Group Jim Yong Kim meminta swasta dapat berinergi dengan perusahaan BUMN melalui skema kemitraan sebagian *joint venture*, dan sekuritisasi dengan pihak swasta. Pemerintah Indonesia diminta mengenali lebih dalam karakteristik dan risiko sektor swasta.

Proyek-proyek seperti logistik, kargo, dan jalan tol merupakan contoh bidang yang diminati swasta, sehingga dukungan dan keterlibatannya harus didorong lebih besar. "Indonesia pembangunannya besar, maka sebaiknya swasta banyak terlibat. BUMN tidak didorong untuk bersaing langsung dengan swasta," kata Kim.

Adapun Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan investasi langsung bisa diarahkan ke luar Pulau Jawa, seperti Indonesia bagian timur yang memberikan pertumbuhan ekonomi. "Investasi itu diarahkan pada yang memberikan lapangan kerja banyak."

Pembangunan fondasi gedung di Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Ulasan kedua rubrik Teropong Media edisi 19 ini, terkait berita Koran Tempo Halaman 18, Rabu, 26 Juli 2017. Berikut ulansannya :

Pembangunan Infrastruktur PUPR Dipercepat

Kesulitan yang terjadi di masa lalu seperti krisis ekonomi Asia 1998-1999, boleh jadi menyebabkan pembangunan infrastruktur Indonesia, tertinggal dari negara lain. Hal ini juga terlihat dari data The Global *Competitiveness Report* 2016-2017 (*World Economic Forum*), dimana pada Indeks Daya saing Global Indonesia (GCI) tahun 2015-2016, rangking Indonesia pada urutan 37 dan tahun 2016-2017 pada urutan 41. Kemudian terkait Indeks Daya Saing Infrastruktur tahun 2015-2016, rangking Indonesia pada urutan 62. Pada tahun 2016-2017 rangking Indonesia meningkat, yakni pada urutan ke-60.

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada 4 arah pengembangan infrastruktur PUPR 2015-2019. Arah pembangunan tersebut berdasarkan Renstra PUPR 2015-2019.

Keempat arah pembangunan infrastruktur PUPR tersebut adalah, pertama, meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan baik antar daerah, antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan. Kedua, mengembangkan infrastruktur sumber daya air, mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Arah pengembangan infrastruktur ketiga, mengembangkan jaringan jalan sebagai konektivitas untuk penguatan daya saing.

Kemudian arah pengembangan infrastruktur keempat adalah mendukung pengembangan perumahan dan perkotaan serta infrastruktur dasar permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup. Kementerian PUPR juga terus memacu pembangunan infrastruktur dengan perencanaan yang berjenjang, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Program infrastruktur dilakukan berbasis 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana potensi yang ada di daerah dikembangkan, untuk terwujudkan kondisi infrastruktur daerah yang memadai.

Masukan Presiden World Bank Group, Jim Yong Kim meminta swasta dapat berinergi dengan perusahaan BUMN melalui skema kemitraan sebagian *joint venture*, merupakan masukan yang baik. Hal ini karena pembangunan infrastruktur Indonesia tidak lagi bertumpu pada APBN dan APBD tapi juga kerja sama dengan pihak swasta. Dengan mengembangkan pembiayaan infrastruktur dari non APBN dan APBD diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur Tingkatkan Pertahanan dan Keamanan Nasional

POS LINTAS NEGARA (PLBN) TERPADU ARUK (SAJINGAN BESAR)

KALIMANTAN BARAT

Sumber: Dok. BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional melalui pengembangan infrastruktur PUPR.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, infrastruktur merupakan aspek strategis dalam peningkatan pertahanan dan keamanan nasional. Salah satunya dengan mengikat seluruh wilayah Indonesia dengan infrastruktur yang terintegrasi, komprehensif dan holistik

"Saat ini Kementerian PUPR telah memberikan berbagai dukungan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional diantaranya, melalui penanganan kawasan perbatan melalui pembangunan dan perbaikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan dan perbaikan jalan kawasan perbatasan serta peningkatan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan," ungkap Rido saat menyampaikan "Peran Infrastruktur PUPR Mendukung Pertahanan dan Keamanan Nasional" di Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI, beberapa waktu lalu.

> Infrastruktur PUPR di tanah air telah menciptakan konektivitas, ketahanan pangan dan air, keterpaduan antar wilayah, keterpaduan antar tingkatan pemerintah, keterpaduan antar sektor.

Menurutnya, infrastruktur PUPR di tanah air telah menciptakan konektivitas, ketahanan pangan dan air, keterpaduan antar wilayah, keterpaduan antar tingkatan pemerintah, keterpaduan antar sektor.

Sementara itu, Rido mengakui, saat ini pada umumnya kondisi infrastruktur dasar termasuk jalan dan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan relatif kurang memadai. "Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang tengah diselesaikan oleh Kementerian PUPR," jelasnya.

Dalam menyelenggarakan peningkatan infrastruktur PUPR, lanjutnya, Kementerian PUPR menggunakan pendekatan kewilayahan untuk mencapai efisiensi penyediaan infrastruktur PUPR. **(lisa/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Kawasan Industri Konawe

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan Pengembangan Kawasan Industri (KI) Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

> Pemerintah pusat memastikan KI Konawe, Sulawesi Tenggara sudah tidak ada kendala administrasi dan perizinan. Sehingga, saat ini tinggal percepatan eksekusi di lapangan.

"Salah satunya Kementerian PUPR telah melakukan penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di lokasi KI Konawe berada," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat "Evaluasi Pembangunan Kawasan Industri Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara," di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (6/7).

Kemudian, lanjutnya, akan ada percepatan pengembangan infrastruktur PUPR mulai dari dukungan jalan, sumber daya air, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penataan lingkungan permukiman di kawasan tersebut. Ia juga menerangkan, terdapat juga jaringan irigasi yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan KI Konawe.

Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan tersebut, Pemerintah pusat memastikan KI Konawe, Sulawesi Tenggara sudah tidak ada kendala administrasi dan perizinan. Sehingga, saat ini tinggal percepatan eksekusi di lapangan.

Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian, Imam Haryono serta

Pemerintah memastikan Kawasan Industri (KI) Konawe sudah tinggal percepatan eksekusi di lapangan.

Sumber: Dok. BPIW

perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta perwakilan pemerintah daerah dan pihak industri swasta.

Menurutnya, permasalahan lahan persawahan dan irigasi yang bersinggungan dengan lahan KI Konawe sudah diselesaikan oleh kementerian terkait.

Luhut mengaku, merasa lega saat ini segala kendala sudah dapat teratasi, sehingga ke depannya diharapkan dapat segera melakukan percepatan pembangunannya.

Di tempat sama, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menerangkan, ada sekitar 500 hektar (ha) lahan sawah dan irigasi yang bersinggungan dengan lahan KI Konawe. "Lahan itu akan dipakai oleh kawasan industri dan sebagai gantinya pemerintah sudah menyiapkan lahan pengganti," ungkap Amran.

Ia menerangkan, Kementerian Pertanian langsung berkordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mempersiapkan lahan pengganti tersebut.

> "Pembangunan industri sempat terkendala karena lahan yang dipakai bersinggungan dengan lahan tambak, rawa dan irigasi yang dipergunakan untuk pertanian," ujar Imam.

Selain itu, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian, Imam Haryono menyatakan, untuk membangun KI Konawe yang bergerak di industri nikel memerlukan lahan sekitar 5.500 ha.

"Pembangunan industri sempat terkendala karena lahan yang dipakai bersinggungan dengan lahan tambak, rawa dan irigasi yang dipergunakan untuk pertanian," ujar Imam.

Namun, lanjutnya, saat ini permasalahan lahan tersebut sudah selesai ketika pihak Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR mendukung penggunaan lahan tersebut untuk keperluan industri. "Hal ini kemajuan yang menggembirakan, karena kawasan industri ini akan sangat banyak menyerap tenaga kerja," tegasnya. **(ris/infobpiw)**

Penyusunan Sinkronisasi Program Jangka Pendek, Akan Berdampak Positif Terhadap Keterpaduan Pembangunan

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musaad menganggap langkah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

> "Selain infrastruktur, pembangunan di Papua didorong oleh sektor pertambangan dan pertanian," ungkap Musaad

Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi Rapat Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019 – 2021 (program 3 tahunan), akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerahnya. Saat ini menurut Musaad, infrastruktur termasuk infrastruktur yang dibangun PUPR merupakan salah satu yang mendorong pembangunan di Papua.

Hal itu disampaikannya saat memberi kata sambutan pada acara yang digelar Pusat Pemprogramman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, di Sorong, Papua Barat, Rabu (12/7).

Akibat dari pembangunan infrastruktur menurut Musaad, Papua mengalami perubahan, seperti pembangunan jembatan yang semula mencapai 15% kini mencapai 25%. Kemudian cakupan air bersih juga meningkat menjadi 42%. Kini, cakupan air bersih ditargetkan mencapai 55%.

Namun kini menurut Musaad, Pemerintah Provinsi Papua sedang mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dilaksanakan tahun

Proses sinkronisasi program 3 tahunan di Kota Sorong, Papua Barat. *Sumber: Dok. BPIW*

2020. Untuk itu kata Musaad ada beberapa infrastruktur yang diharapkan akan dibangun, yakni rumah atlet, rumah deret, air bersih, dan *fly over.*

Kepala Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto berharap forum-forum koordinasi atau diskusi seperti yang dilakukan di Kota Sorong ini akan lebih diintensifkan. "Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang terpadu dapat tercapai," ucap Iwan.

Lebih lanjut Iwan menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan suatu rangkaian proses yang akan berkelanjutan, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah.

Rangkaian proses penyusunan ini dimulai dari rencana tata ruang wilayah nasional provinsi maupun kabupaten/kota, kemudian dipertimbangkan oleh PUPR untuk dimasukkan ke dalam *masterplan* dan *development plan yang* mencakup pengembangan kawasan perdesaan maupun perkotaan. Sehubungan dengan pendanaan infrastruktur PUPR, menurut Iwan, pendanaan bersumber dari APBN adalah pilihan terakhir.

> Rangkaian proses penyusunan ini dimulai dari rencana tata ruang wilayah nasional provinsi maupun kabupaten/kota, kemudian dipertimbangkan oleh PUPR

Kabid Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang Bappeda Papua Barat, Drs. Alberth Nauw, juga memberikan kata sambutannya. Alberth menilai, program yang dibuat Kementerian PUPR seperti Trans Papua, sangat positif dalam membuat konektivitas di beberapa kawasan di Papua, sehingga dapat mendorong potensi daerah."Masyarakat kita yang terisolir bisa menikmati dampak dari pembangunan. Hal ini penting, karena mereka juga merupakan bagian masyarakat," tuturnya. (**hen/ris/infobpiw)**

Kementerian PUPR dan Kementerian Pariwisata Bahas 4 Agenda Percepatan Pengembangan KSPN

Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Kementerian Pariwisata, Hiramsyah S. Thaib beserta jajarannya, melakukan pertemuan dengan para pejabat di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dan Sekretaris BPIW, Firman Hatorangan Napitupulu, Kamis (6/7).

Dalam kunjungan yang berlangsung di ruang rapat BPIW tersebut, Hiramsyah mengatakan ada empat agenda yang menjadi tujuan kunjungan timnya ke BPIW. Agenda pertama adalah, ingin membahas percepatan berkaitan dengan *dashboard monitoring* destinasi wisata, terutama yang ada di Kementerian PUPR.

"*Dashboard monitoring* ini yang memantau perkembangan 10 destinasi kawasan pariwisata prioritas dan juga berkaitan dengan pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara," ungkap Hiramsyah.

Agenda kedua, yakni untuk mengetahui dukungan percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR terhadap 10 destinasi pariwisata, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger- Semeru (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Pulau Morotai (Maluku Utara), dan Laubuan Bajo (NTT).

> "Supaya tidak bertabrakan dengan sektor lain, menurut saya perlu yang ada yang memonitor setiap saat tugas kita masing-masing. Biasanya itu dilakukan Kementerian Koordinator, "

Dalam agenda ketiga, menurut Hiramsyah, instansinya juga ingin mengetahui seperti apa dukungan Kementerian PUPR terhadap program *homestay* Desa Wisata. Program ini dicetuskan Presiden Joko Widodo, saat Sail Selat Karimata, tahun lalu. Agenda keempat, dukungan Kementerian PUPR terkait kawasan wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal itu, Hadi Sucahyono menyatakan terkait *dashboard monitoring* akan ada tim dari BPIW yang mematangkannya secara detil, secara terus menerus. Kemudian terkait dukungan percepatan pembangunan infrastruktur 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sudah ada World Bank yang memberikan loan untuk pembuatan integrated tourism masterplan

3 destinasi, yakni Borobudur, Danau Toba, dan Mandalika. "Diluar 3 KSPN itu, kita intensif melakukan percepatan, karena kita ada masterplan dandevelopment plan yang bersentuhan dengan 7 KSPN, dan masukan dari Kementerian Pariwisata akan melengkapi *masterplan* dan *development plan* KSPN tersebut," tutur Hadi.

Kemudian menyangkut masalah homestay, menurut Hadi, untuk rumah yang tidak layak huni bisa dijadikan homestay dengan *local wisdom*. "Ada yang memang dari PUPR untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Tinggal kita perlu data, rumah mana yang akan dijadikan *homestay* dengan mendukung lokal wisdom tadi," ucap Hadi lagi. Sedangkan terkait

10 Destinasi Pariwisata Prioritas

dukungan terhadap Kawasan Mandeh, termasuk juga Toraja kata Hadi sudah dialokasikan untuk dibuatkan program pengembangannya.

Sementara itu, Firman Hatorangan Napitupulu menyatakan koordinasi dengan instansi terkait, harus terus dilakukan, sehingga dapat mempercepat pengembangan kawasan wisata tersebut. "Supaya tidak bertabrakan dengan sektor lain, menurut saya perlu yang ada yang memonitor setiap saat tugas kita masing-masing. Biasanya itu dilakukan Kementerian Koordinator, " tutur Firman.

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo menyarankan agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan juga tetap mengangkat kekhasan atau ciri khas dari daerah tersebut. "Kita angkat budaya daerahnya, termasuk melalui rumah-rumah warga," imbuh Bobby.
Bila berkaitan dengan perdesaan menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga, unit kerjanya dapat mendukung melalui penyusunan masterplan 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

> "Perlu yang ada yang memonitor setiap saat tugas kita masing-masing. Biasanya itu dilakukan Kementerian Koordinator, " tutur Firman.

Bulan Maret lalu telah disepakati pembagian wewenang penyusunan *masterplan* tersebut, yakni oleh Kementerian PUPR melalui BPIW, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPTT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dari KPPN yang kita tangani ada yang bersentuhan dengan KSPN, salah satunya Danau Toba. Kami akan menyusun infrastruktur apa yang dibutuhkan di kawasan tersebut," ucapnya. Pertemuan tersebut dihadiri juga pejabat eselon 3 dan 4 BPIW serta beberapa staf.

(Hen/infobpiw)

BPIW Ramaikan Pameran Indonesia *International Smart City Expo & Forum* 2017

BPIW dorong pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berpartisipasi meramaikan pameran *Indonesia International Smart City & Forum* yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, (12-14/7).

Salah satu wujud partisipasi BPIW tersebut adalah menjadi narasumber ,dalam *talkshow* bertema "*Smart City Development in Developing Countries Challenges and Opportunities*". Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, Eko Budi Kurniawan, mewakili BPIW pada *talkshow* yang digelar usai pembukaan tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri narasumber lain seperti, Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, Direktur *e-Government* Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Firmansyah Lubis, *Head of Consulting Fros Sullivan*, Subhanshu Sekhar, Ketua Realestate Indonesia (REI) Kadin, Eddy Hussy, serta perwakilan *Asia Development Bank*, Rabin Hattari.

Eko Budi Kurniawan menyatakan, BPIW membuat standar untuk Kota Cerdas Berkelanjutan itu harus memiliki sejumlah komponen pokok, antara lain *Smart*

Living, Smart Economy and Mobility, Smart Ecological Environment dan *Smart Governance and Community.*

"Kata smart disini, tidak terbatas pada penggunaan ilmu teknologi aplikasi, akan tetapi kita menggunakan juga teknologi-teknologi lainya dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan," ujar Eko.

> "BPIW membuat standar untuk Kota Cerdas Berkelanjutan itu harus memiliki sejumlah komponen pokok, antara lain *Smart Living, Smart Economy and Mobility, Smart Ecological Environment* dan *Smart Governance and Community,"*

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang sudah dipraktekan oleh Kementerian PUPR dalam pengembangan *Smart City*, salah satunya *smart development planning and design* melalui pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) di koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Sementara itu, Direktur *e-Government*, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Firmansyah Lubis mengatakan, saat ini Kominfo bersama Bappenas dan Kantor Kepresidenan Republik Indonesia tengah menggulirkan program 100 *Smart City* di Indonesia.

Sumber: Dok BPIW

Di tempat yang sama, Bupati Banyuwangi, Azwar Anas mengungkapkan masyarakat Banyuwangi telah mendapat penghargaan peringkat pertama di bidang Inovasi Kebijakan Pariwisata dalam ajang Festival Film Perancis pada tahun 2016. "Peringkat pertama itu didapat dari kompetisi yang dikuti 177 negara. Prestasi tersebut diraih berkat partisipasi anak muda Banyuwangi yang menggunakan perangkat wifi secara positif dan kreatif," terangnya.

Ia menambahkan, Banyuwangi juga memiliki program unggulan dalam mendukung dan mewujudkan *Smart City* yakni program Smart Kampung. Dalam Program *Smart* Kampung ada dukungan pemasangan fiber optik sebanyak 1.400 jaringan wifi. "Dengan adanya wifi, masyarakat di Banyuwangi dapat menggunakan internet sehingga lebih melek teknologi, bisa membuat video pariwisata dan kemudian *dishare* di media sosial, hasilnya prestasi tingkat dunia yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ungkap Azwar Anas.

Selain mengisi sesi *talkshow,* BPIW Kementerian PUPR juga mempresentasikan produk-produk yang berhubungan dengan Kota Cerdas Berkelanjutan yakni penerapan *smart green open space*, penerapan *smart green waste management*, peta sebaran 35 WPS, elemen - elemen kota cerdas berkelanjutan, dan juga capaian Kementerian PUPR di tahun 2016. (**ind/ infoBPIW**)

BPIW Pacu Akselerasi Pengembangan Kota Baru Publik Maja

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) pembangunan kawasan Kota Baru Publik Maja. Rapat monev yang dihadiri seluruh stakeholder tersebut digelar di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu, (19/7).

Turut hadir dalam rapat monev ini, antara lain Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Eko D. Heripoerwanto, Kabid Perencanaan dan Tata ruang BBPJN IV, Beni Fariaty, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga, Akademisi ITB, M Jehansyah Siregar serta sejumlah perwakilan kementerian dan stakeholder terkait.

Rido Matari Ichwan mengatakan, monev dilakukan guna dapat mempercepat pengembangan Kawasan Kota Baru Publik Maja sesuai *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangi pada 27 Juni 2016 lalu.

> "Pola ruang Kota Baru Publik Maja dapat menampung 38 ribu unit rumah mewah, 76 ribu unit rumah menengah, 114 ribu unit rumah MBR *(landed housing)* dengan proporsi pembangunan rumah 1:2:3,"

Lebih lanjut, Rido menerangkan, dalam MOU tersebut Kementerian PUPR memiliki kewajiban membuat masterplan Kota Baru Publik Maja, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan akses Maja. "Termasuk pengadaan tanahnya bagi kepentingan umum untuk pembangunan jalan akses Maja," terangnya.

Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Banten memiliki kewajiban untuk melakukan penetapan lokasi (Penlok) ruas jalan akses Maja. Sedangkan, Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan berkewajiban melakukan fasilitasi koordinasi pengadaan tanah jalan akses Maja, fasilitas perizinan pengembangan Kota Baru Publik Maja serta melakukan pengendalian dan pengawasan penyediaan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, para pengembang pembangunan berkewajiban melakukan penyediaan lahan pembangunan jalan akses Maja, melakukan pembangunan rumah MBR bersubsidi dalam mendukung program pemerintah sejuta rumah.

Lingkup Wilayah Administratif Kota Baru Publik Maja

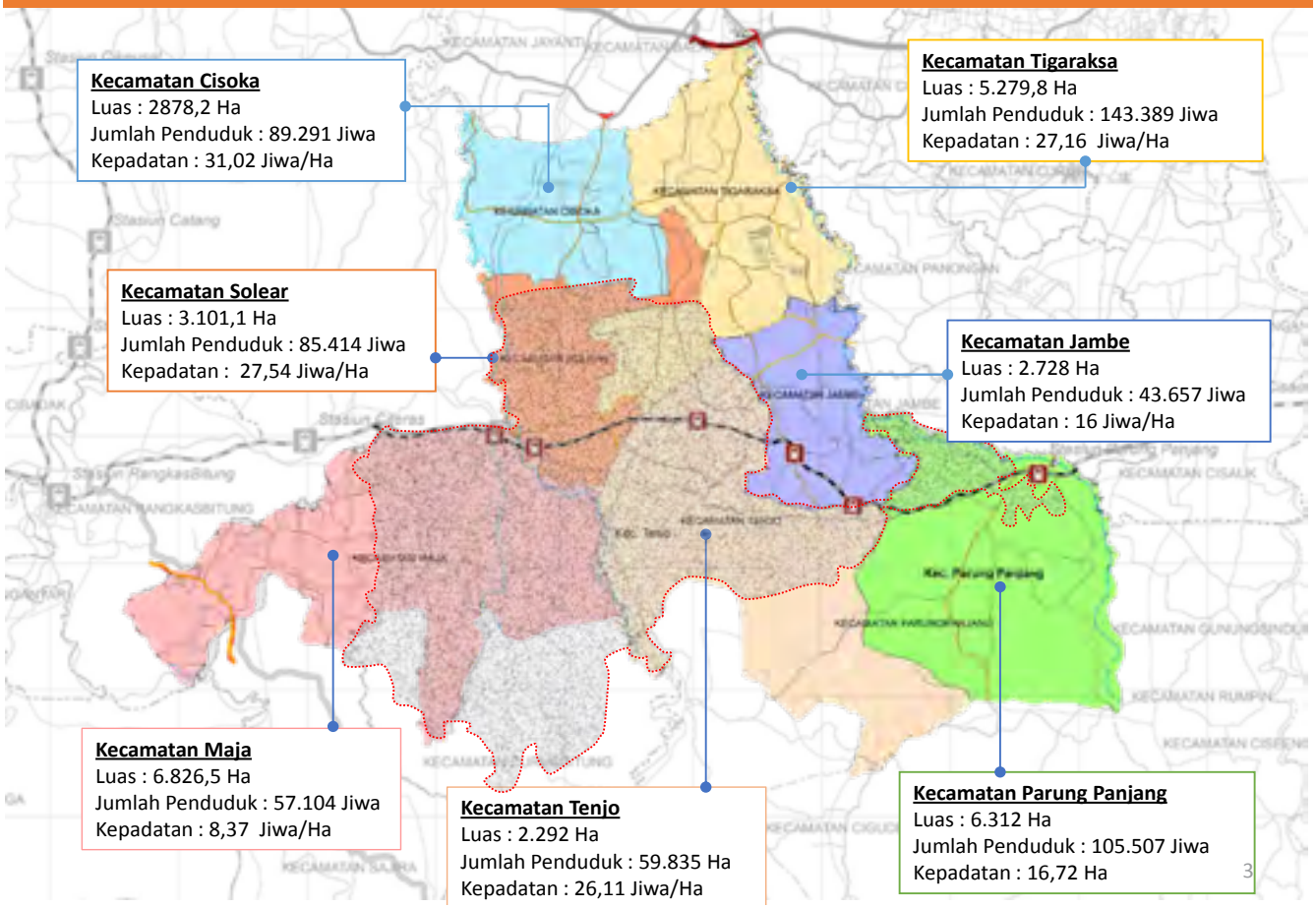

Menurut Rido, pola ruang Kota Baru Publik Maja dapat menampung 38 ribu unit rumah mewah, 76 ribu unit rumah menengah, 114 ribu unit rumah MBR *(landed housing)* dengan proporsi pembangunan rumah 1:2:3.

Ia juga mengatakan, berdasarkan Permen PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 mengenai pengembangan Kota Baru dan Cerdas, Kota Baru Publik Maja masuk salah satu dari 97 kawasan yang diprioritaskan pengembanganya.

"Sejauh ini sudah menunjukan progres yang cukup baik. Bulan depan akan dilakukan laporan pendahuluan, *feasibility studi* (FS) bulan Mei dilakukan.

Terkait kendala permasalahan yang ada seperti perlu adanya Surat Keterangan (SK) penetapan deliniasi kawasan Kota Baru Maja, belum adanya perjanjian kerja sama (PSK) sebagai turunan dari MoU bersama antara sektor di Kementerian PUPR dengan pengembang dan pemda dengan pengembang, serta izin lokasi tiap pengembang belum teridentifikasi secara lengkap, agar bisa segera cepat terselesaikan. Diharapkan Desember secara pararel FS dan DED *(Detail Enginering Desain)* selesai secara bersamaan," terang Rido.

> "Dalam rangka percepatan pengembangan Kota Batu Publik Maja pengembang pembangunan diminta segera menyerahkan *siteplan* khususnya untuk pembangunan rumah MBR,"

Sementara itu, Eko D. Heripoerwanto menjelaskan berdasarkan PP 64/2016 mengenai Pembangunan perumahan MBR, saat ini pengembangan untuk lahan yang luasnya tidak lebih dari 5 hektare (Ha) tidak perlu lagi izin lokasi. "Dalam hal ini, peran pemerintah daerah yang bertugas untuk pengendalian perizinan", tegas Eko.

Sementara itu, Agusta Ersada Sinulingga menjelaskan, dalam rangka percepatan pengembangan Kota Batu Publik Maja pengembang pembangunan diminta segera menyerahkan siteplan khususnya untuk pembangunan rumah MBR. Pasalnya, hal tersebut akan dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengendalian hunian.

Wakil Ketua Realestate Indonesia (REI) yang merupakan perwakilan pengembangan, Okto sepakat agar para pengembang segera menyerahkan *siteplan* pembangunan rumah MBR. Pasalnya, Kota Baru Publik diharapkan menjadi projek percontonan kawasan kota baru di Tanah Air.(ind/infoBPIW)

Audiensi Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia

Sejumlah isu wilayah dan perkotaan yang masih mengemuka di Tanah Air, antara lain; kesenjangan, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), rendahnya daya saing kota serta belum optimalnya pengelolaan perkotaan.

Demikian dipaparkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan saat membuka "Audiensi Strategi Pembangunan Perkotaan Indonesia" di Kantor BPIW, Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (19/7).

Dalam pertemuan tersebut hadir tokoh perkotaan yang juga mantan Menteri Pekerjaan Umum periode 1998-1999, Rachmadi Bambang Sumadhijo, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Agus Wijanarko, mantan Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus serta seluruh perwakilan unit organisasi (Unor) di Kementerian PUPR.

Rido mengatakan, untuk dapat menyelesaikan isu-isu perkotaan memang diperlukan mendengar dari banyak kalangan. "Termasuk para senior yang telah berpengalaman menangani isu-isu perkotaan," terangnya.

Saat ini, Rido menerangkan, banyak kebijakan dan konsep pembangunan perkotaan. "Seperti arahan pengembangan perkotaan dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UU 26 tahun 2007,-red) dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 tahun 2014,-red)," ungkap Rido.

> "Selama ini pengembang memang kerap peduli terkait keuntungannya. Bahkan, malah menambah kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Sebut saja kasus di kawasan Karawaci, banyak masyarakat kecil di lingkungan perumahan-perumahan elite itu kesulitan mendapat air minum. Padahal, perumahan-perumahan elite yang dibangun pengembang memiliki air bersih yang berlebih,"

Kemudian arahan pengembangan perkotaan dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kemudian arahan kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan perkotaan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Selain itu, ada Kebijakan, Strategi, dan Rencana Pengembangan Perkotaan di dalam Perpres Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres 2/2015 tentang RPJMN)

"Kemudian, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional 2015-2045 (KSPPN), Rencana Strategis Kementerian PUPR sampai pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Perkotaan berdasarkan Konsep Kota Cerdas Berkelanjutan," terangnya Rido.

Dari arahan, kebijakan dan konsep pembangunan perkotaan tersebut, lanjut Rido, pada akhirnya diperlukan strategi pembangunan perkotaan terencana dan implementatif, agar isu perkotaan secara perlahan dapat diselesaikan.

Di tempat sama, Mantan Menteri Pekerjaan Umum periode 1998-1999, Rachmadi Bambang Sumadhijo mengatakan, saat ini dalam menyelesaikan masalah perkotaan perlu diutamakan adalah desentralisasi dari pusat ke daerah dalam pengelolaan wilayah. "Desentralisasi harus dilakukan, karena pemerintah pusat akan kesulitan kalau harus eksekusi sampai pengawasan di seluruh daerah," terangnya.

Rachmadi mengatakan, hal utama adanya desentralisasi tersebut agar terwujudnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kota.

"Selain itu tata kelola itu, hal yang harus dijaga adalah jangan sampai pemerintah daerah di*drive* (dikendalikan,-red) oleh pengembang," terangnya. Menurut Rachmadi, jika pemerintah daerah dapat dikendalikan pengembang, hal yang terjadi adalah pembangunan merugikan masyarakat kecil. Sebab, karakter pengembang hanya mencari peluang keuntungan.

Hal senada diungkapkan, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Agus Wijanarko. Ia berpendapat, aturan yang berimbang kepada pengembangan dapat menjadi salah satu solusi dalam penataan kota yang lebih baik.

"Selama ini pengembang memang kerap peduli terkait keuntungannya. Bahkan, malah menambah kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Sebut saja kasus di kawasan Karawaci, banyak masyarakat kecil di lingkungan perumahan-perumahan elite itu kesulitan mendapat air minum. Padahal, perumahan-perumahan elite yang dibangun pengembang memiliki air bersih yang berlebih," paparnya.

Mantan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus mengatakan, aturan-aturan pembangunan yang dilakukan pengembang memang perlu mendapat perhatian lebih. Pasalnya, untuk persoalan permukiman di perkotaan kerap dipicu oleh pengembang.

Ia mencontohkan, banyak masyarakat korban penggusuran tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan subsidi perumahan dan uang ganti lahan. Pasalnya, lokasi rumah subsidi yang didapat korban penggusuran posisinya berada jauh dari tempat kerjanya."Akhirnya uang ganti rugi dan subsidi perumahan, kurang memberi dampak positif karena dampak ongkos dari rumah ke tempat kerja yang jauh," terang Maurin.

> "Adanya audiensi yang dihadiri seluruh perwakilan Unor di Kementerian PUPR ini, diharapkan dapat berkembang menjadi diskusi di masing-masing Unor serta menghasilkan strategi-strategi terbaik di sektornya untuk mendukung pembangunan perkotaan di Tanah Air," terang Agusta.

Sementara itu, Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Napitupulu mengatakan, aturan dan pengawasan terhadap pengembang memang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat dalam rangka meminimalisir persoalan perkotaan.

Di tempat sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, layak huni, berkelanjutan dan berdaya saing diperlukan strategi pembangunan perkotaan yang efektif dan implementatif.

"Adanya audiensi yang dihadiri seluruh perwakilan Unor di Kementerian PUPR ini, diharapkan dapat berkembang menjadi diskusi di masing-masing Unor serta menghasilkan strategi-strategi terbaik di sektornya untuk mendukung pembangunan perkotaan di Tanah Air," terang Agusta.

Sebelum acara ditutup, para pembicara mendapat Dua buku perencanaan kota, yaitu buku "Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah: Kumpulan Praktik-praktik Inspiratif" (Terjemahan dari*Guidelines on Urban Territorial Planning: Towards a Compendium of Inspiring Practices*) dan "Penataan Kota Bagi Para Pemimpin Daerah" (Terjemahan dari *Urban Planning for City Leader*) yang diterbitkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). **(ris/infoBPIW)**

Kementerian PUPR dan Kementerian DPDTT Sepakat Akselerasi Pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) sepakat untuk melakukan percepatan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Transmigrasi.

Hal itu terungkap saat Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dan Dirjen P2MKT Kementerian DPPDT, M Nurdi melakukan audiensi percepatan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi di Jakarta, Kamis (20/7).

> "Melalui penerapan WPS diharapkan pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan tepat, serta memberi efek berantai pada pengembangan di wilayah-wilayah sekitarnya,"

Rido mengatakan, Kementerian PUPR dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur menerapkan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Ia menjelaskan, seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan dalam 35 WPS. "Melalui penerapan WPS diharapkan pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan tepat, serta memberi efek berantai pada pengembangan di wilayah-wilayah sekitarnya," paparnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam setiap WPS tersebut terdapat tema kawasan-kawasan pengembangan, seperti Kawasan Industri (KI), Kota Terpadu Mandiri (KTM), Kawasan Ekonomi

Program Prioritas

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa-kota

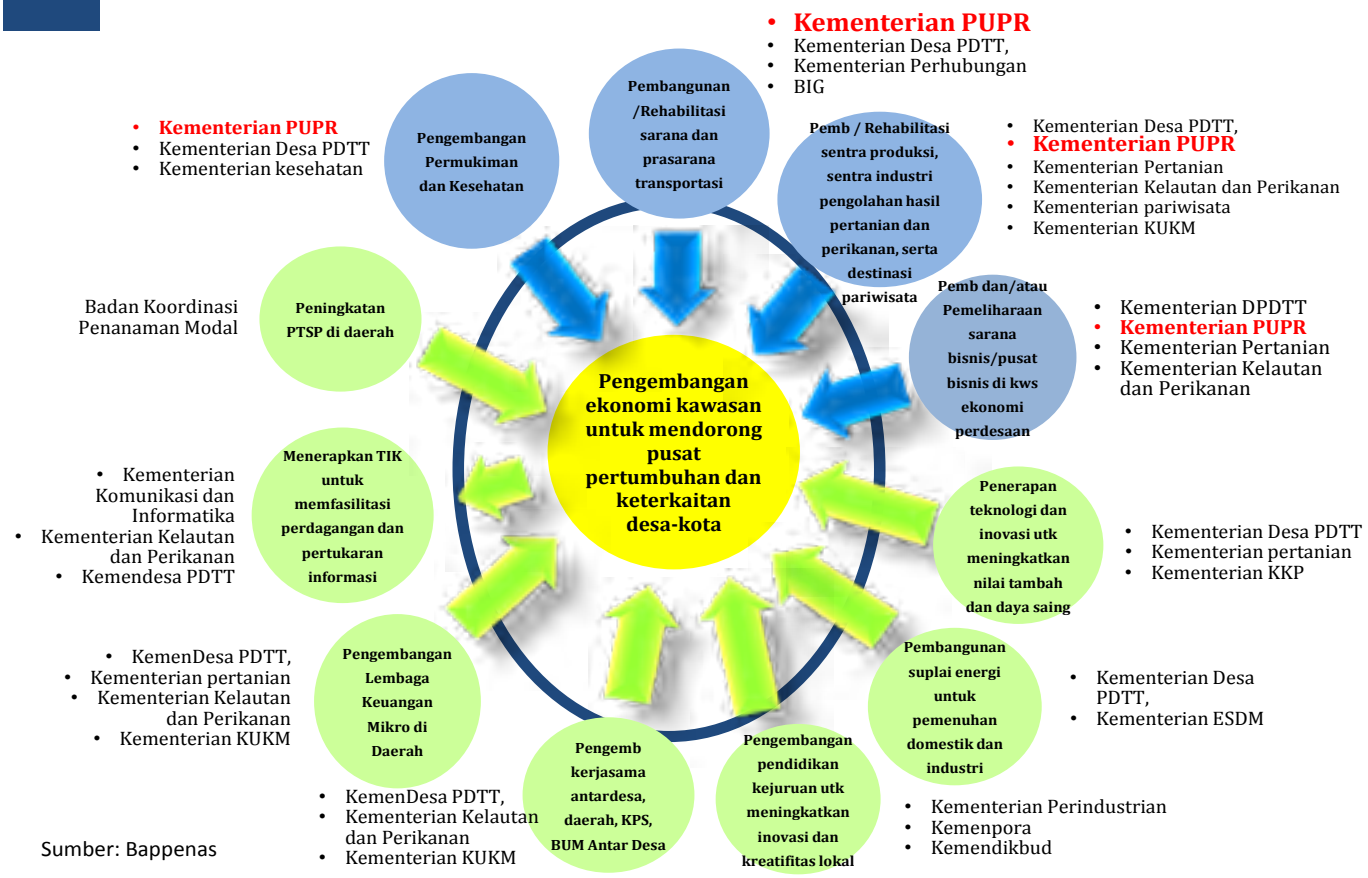

Sumber: Bappenas

Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan lainnya.

Terkait dukungan terhadap KTM, lanjutnya, Kementerian PUPR memprioritaskan terhadap KTM yang berada di area WPS serta telah memenuhi kriteria kesiapan pengembangan infrastruktur.

Rido berharap, dukungan infrastruktur PUPR terhadap KTM akan mempercepat terwujudnya pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi. Sementara itu, Dirjen P2MKT Kemen DPDTT, M. Nurdin menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik yang dilaksanakan Kementerian PUPR dalam mewujudkan percepatan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi di Tanah Air.

M. Nurdin mengatakan, untuk pengembangan KTM memang membutuhkan banyak sentuhan dari instansi lintas sektor, terutama terkait infrastruktur dasar dari Kementerian PUPR. "Agar produk hasil pertanian masyarakat dapat lebih cepat didistribusikan ke pasar. Dengan distribusi hasil panen yang lebih cepat, diharapkan pendapatan masyarakat juga akan lebih baik" ujarnya.

> Nurdin berharap, adanya koordinasi yang baik antara Kementerian PUPR dan Kemendes PDTT akan membuat pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi dapat cepat terwujud, agar KTM yang dikembangkan dapat berkembang sesuai harapan masyarakat transmigran.

Menurutnya, KTM Kawasan Transmigrasi pada umumnya membutuhkan dukungan infrastruktur jalan, jembatan, penyediaan air bersih dan lainnya. Untuk lebih detail tim dari Kemen DPDTT akan proaktif menyampaikan usulan kepada Kementerian PUPR.

Nurdin berharap, adanya koordinasi yang baik antara Kementerian PUPR dan Kemendes PDTT akan membuat pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi dapat cepat terwujud, agar KTM yang dikembangkan dapat berkembang sesuai harapan masyarakat transmigran. (**ris/infoBPIW**)

Susun MPDP, Upaya Akselerasi Wujudkan Kota Baru Sorong

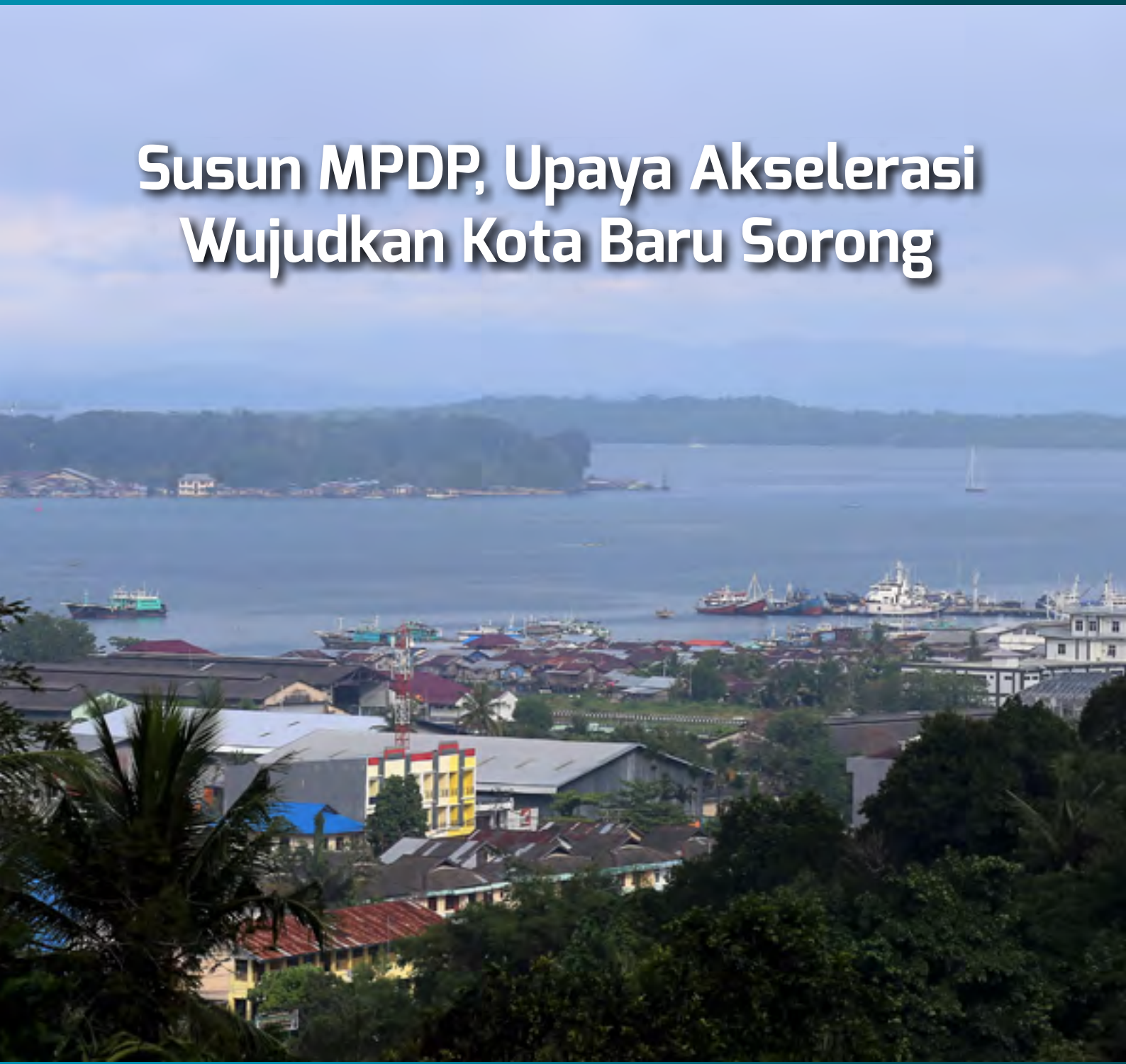

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu akselerasi pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menekan tingkat disparitas infrastruktur antar KTI dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang mengacu terhadap mandat Nawacita dan Visi Misi Presiden.

Kebijakan tersebut juga mengacu terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat amanat untuk mengurangi kesenjangan dengan percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), penyediaan infrastruktur, dan pengembangan teknologi.

Salah satunya melalui pengembangan 10 Kota Baru di Tanah Air. Adapun salah satu kota baru yang ditetapkan RPJMN tersebut adalah Kota Baru Sorong. Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) komitmen mendorong terwujudnya percepatan pengembangan Kota Baru Sorong dan kota di sekitarnya. Komitmen tersebut terungkap dalam *Forum Group Discussion* "Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) Kota Baru Sorong dan Sekitarnya" di Kota Sorong, Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Turut hadir dalam FGD yang digelar BPIW Kementerian PUPR tersebut perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Pemkab Raja Ampat, Pemkab Manokwari, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, saat ini pengembangan infrastruktur kota di Indonesia mengalami disparitas yang cukup tinggi antara KTI dan KBI.

Untuk itu, lanjutnya, perlu ada upaya untuk mengembangkan infrastruktur dalam rangka menciptakan keseimbangan dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satunya dengan mewujudkan kota baru publik yang dapat juga berfungsi sebagai penyangga kota induk.

> "Perlu ada upaya untuk mengembangkan infrastruktur dalam rangka menciptakan keseimbangan dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satunya dengan mewujudkan kota baru publik yang dapat juga berfungsi sebagai penyangga kota induk,"

Kota Baru Sorong merupakan salah satu prioritas pembangunan kota baru di wilayah Papua, agar terwujud Kota Baru Sorong sebagai pengembangan perkotaan Sorong sebagai pintu gerbang tanah Papua.

Dari Hasil FGD tersebut diharapkan didapatkan kesepakatan lokasi prioritas pembangunan kota baru pablik yang mandiri dan terpadu sebagai pusat pemukiman baru yang layak huni dengan didukung fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap. Sehingga, kedepannya akan terbentuk pembangunan Kota Baru Sorog yang mandiri, terpadu serta ada penguatan fungsi kawasan perkotaan Sorong dan sekitarnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

KOTA BARU DALAM SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

Suasana diskusi Kota Baru Sorong *Sumber: Dok. PUPR*

Dalam pengembangan Kota Baru Sorong, ungkap Agusta, BPIW memiliki tugas menyusun *masterplan* dan *development plan* infrastruktur bidang PUPR untuk pembangunan Kota Baru Pubik. "Setelah BPIW membuat *masterplan* dan *development plan* Kota Baru Sorong, maka *untuk* teknis perencanaan detail dan fisik pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh beberapa unor (unit organisasi,-red) terkait di Kementerian PUPR," jelas Agusta.

Di tempat yang sama, hal senada diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, M. Rudy Siahaan. Menurutnya, dalam pengembangan kota baru publik Sorong perlu ada penekanan pada upaya mengurangi risiko bencana alam dengan pengembangan di lokasi baru yang lebih aman.

Kemudian, lanjunya, sebagai antisipasi kebutuhan permukiman sebagai dampak perkembangan ekonomi. "Serta adanya pertumbuhan kebutuhan kawasan pemukiman yang aman, nyaman dan layak huni," terang Rudy. Selain itu, perlu mendorong prinsip integrasi dalam pengembangan Kota Baru Sorong sebagai kawasan pengembangan ekonomi.

> Setelah BPIW membuat *masterplan* dan *development plan* Kota Baru Sorong, maka untuk teknis perencanaan detail dan fisik pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh beberapa unor (unit organisasi,-red) terkait di Kementerian PUPR," jelas Agusta.

Dalam rangka mendukung pengembangan Kota Baru Sorong, Rudi menjelaskan, Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2017 menggulirkan program pembangunan, antara lain peningkatan struktur Jalan Rufei-Sauka, peningkatan struktur Jalan Basuki Rahmat, peningkatan pemukiman Kawasan Rawa Indah Sawagumu, penataan bangunan kawasan strategis Pulau Doom, pembangunan sistem pengelolaan air limbah skala kawasan Kota Sorong, pembangunan drainase lingkungan harapan indah Kota Sorong, pembangunan tempat penyimpanan akhir sampah Kota Sorong dan lainnya.

Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Onesimus Assem mengakui, saat ini Kota Sorong memilki luas wilayah 1.105 KM, "Pertumbuhan penduduk di Kota Sorong termasuk pesat, pada 2015 saja penduduknya mencapai 225,588 jiwa," ungkap Onesimus.

Menurutnya, pengembangan untuk Kota induk Sorong akan lebih fokus pada penataan dan revitalisasi kawasan. "Untuk Kota Baru Publik Sorong diharapkan untuk pengembangan pusat bisnis, permukiman, industri serta kawasan wisata dan preservasi," paparnya.

Dalam rangka melakukan akselerasi pengembangan Kota Baru Sorong dan

Menurut Onesimus, perlu adanya perencanaan yang baik dan sinkron yang didukung oleh semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Hal ini untuk mendukung pengembangan keterpaduan Infrastruktur PUPR di kawasan Kota Baru Publik Sorong.

kawasan di sekitarnya, diperlukan keterpaduaan kegiatan-kegiatan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah serta membuka akses dari wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan.

Hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan Kota Baru Sorong, lanjutnya, kesiapan infrastruktur yang mantap, baik infrastruktur PUPR, infrastruktur perhubungan maupun infrastruktur energi dan telekomunikasi.

Menurut Onesimus, perlu adanya perencanaan yang baik dan sinkron yang didukung oleh semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Hal ini untuk mendukung pengembangan keterpaduan Infrastruktur PUPR di kawasan Kota Baru Publik Sorong.

Misalnya, dalam pembebasan lahan untuk Pembangunan SPAM Regional Sorong yang mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dalam pemenuhan kebutuhan air bagi sektor Industri, Pertanian, Permukiman, Perdagangan dan Jasa. Termasuk, pembangunan ruas jalan Seget-Aimas-Pelabuhan Arar serta ruas jalan lainnya dari dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan lain sebagainya.

Artinya pengembangan Kota Baru Publik Sorong memerlukan proyek-proyek strategis nasional yang menunjang pengembangan wilayah tersebut. **(Tim Redaksi)**

Meningkatkan dan Menyempurnakan Mutu BPIW, #bpiwbersinergi

Dr. Ir. M. Tranggono, M.Sc.
Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BPIW Kementerian PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR adalah unit yang baru dibentuk di lingkungan Kementerian PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dengan tugas yang cukup penting tersebut, maka sudah seharusnya BPIW memiliki sistem kerja yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas itu. Dengan kata lain, bahwa ketika BPIW melakukan sinergi dan keterpaduan dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, maupun dengan kementerian maupun lembaga lain, maka sudah semestinya antar unit kerja di BPIW melakukannya terlebih dahulu. Sebab, bagaimana BPIW bisa melakukan sinergi dengan pihak lain, kalau dalam unit kerja BPIW sendiri tidak melakukan sinergi.

**tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi*

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR adalah unit yang baru dibentuk di lingkungan Kementerian PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Dengan tugas yang cukup penting tersebut, maka sudah seharusnya BPIW memiliki sistem kerja yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas itu. Dengan kata lain, bahwa ketika BPIW melakukan sinergi dan keterpaduan dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, maupun dengan kementerian maupun lembaga lain, maka sudah semestinya antar unit kerja di BPIW melakukannya terlebih dahulu. Sebab, bagaimana BPIW bisa melakukan sinergi dengan pihak lain, kalau dalam unit kerja BPIW sendiri tidak melakukan sinergi.

> BPIW harus bersinergi, melakukan keterpaduan, keteraturan tugas dan melaksanakan fungsi masing-masing unit kerja. Hal ini akan berhasil bila BPIW punya program kerja yang baik

Oleh karenanya, BPIW harus bersinergi, melakukan keterpaduan, keteraturan tugas dan melaksanakan fungsi masing-masing unit kerja. Hal ini akan berhasil bila BPIW punya sistem proses bisnis dan program kerja yang baik. Awal berdiri, BPIW mendapatkan anggaran cukup besar. Hal ini menunjukkan ekspektasi Menteri PUPR, bahwa BPIW dapat menjadi lembaga yang bisa menterpadukan kegiatan-kegiatan PUPR. Kini anggaran BPIW cenderung menurun. Hal itu perlu disikapi dengan terus meningkatkan kinerja BPIW. Hal penting sehingga jangan sampai orang beranggapan, ada atau tidaknya BPIW tidak berarti apa-apa, atau dengan kata lain BPIW tidak dibutuhkan dan dapat dibubarkan. Salah satu tantangan yang ada adalah bagaimana ISO-9001 yang telah diperoleh semua eselon II di lingkungan BPIW dapat menjadi *tools* serta terintegrasi sesuai tugas dan fungsi pada setiap sub unit di BPIW dalam membantu pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Untuk itu, BPIW harus melakukan peningkatan dan penyempurnaan mutu, dengan telah dibentuknya Tim Penyempurnaan dan Peningkatan Mutu BPIW (TP2MB). Dasar pembentukan TP2MB adalah Surat Keputusan Kepala BPIW No. 20/KPTS/KW/2017 tertanggal 20 Mei 2017. Tim ini terdiri dari 12 orang, dan saya sebagai Ketua Tim. Kedua belas orang ini terdiri dari 4 orang dari anggaran umum di pusat-pusat, 4 orang dari sekretariat, dan 4 orang wakil-wakil yang ditunjuk oleh eselon 2. Kita menilai bahwa bila BPIW tidak berubah atau tidak melakukan perbaikan, maka kredibilitas lembaga ini akan turun.

TP2MB telah berhasil merumuskan rekomendasi peningkatan dan penyempurnaan mutu di lingkungan BPIW agar lembaga ini dapat kredibel dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan Pak Menteri seperti yang tersurat dan tersirat pada Permen PU No. 15 tahun 2015. Berdasarkan pertimbangan itu, para pimpinan dan karyawan di lingkungan BPIW sepakat untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan mutu BPIW dengan baik. Ada tiga hal yang menjadi prioritas berdasarkan beberapa rekomendasi yang diberikan dan akan dijelaskan di bawah ini.

Rekomendasi pertama yang harus dilakukan, yakni menyangkut proses bisnis, dimana perlu dilakukan penajaman dan didokumentasikan dengan baik. Hal ini untuk mencegah kesalahan interpretasi dan juga pegangan dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan BPIW. Proses bisnis tersebut harus didokumentasikan dengan baik, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, sehingga terwujudnya konsepsi yang sama. Pada gambar tersebut ditunjukkan *system thinking* proses pekerjaan yang terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan layanan pada unit organisasi BPIW, untuk tujuan organisasi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

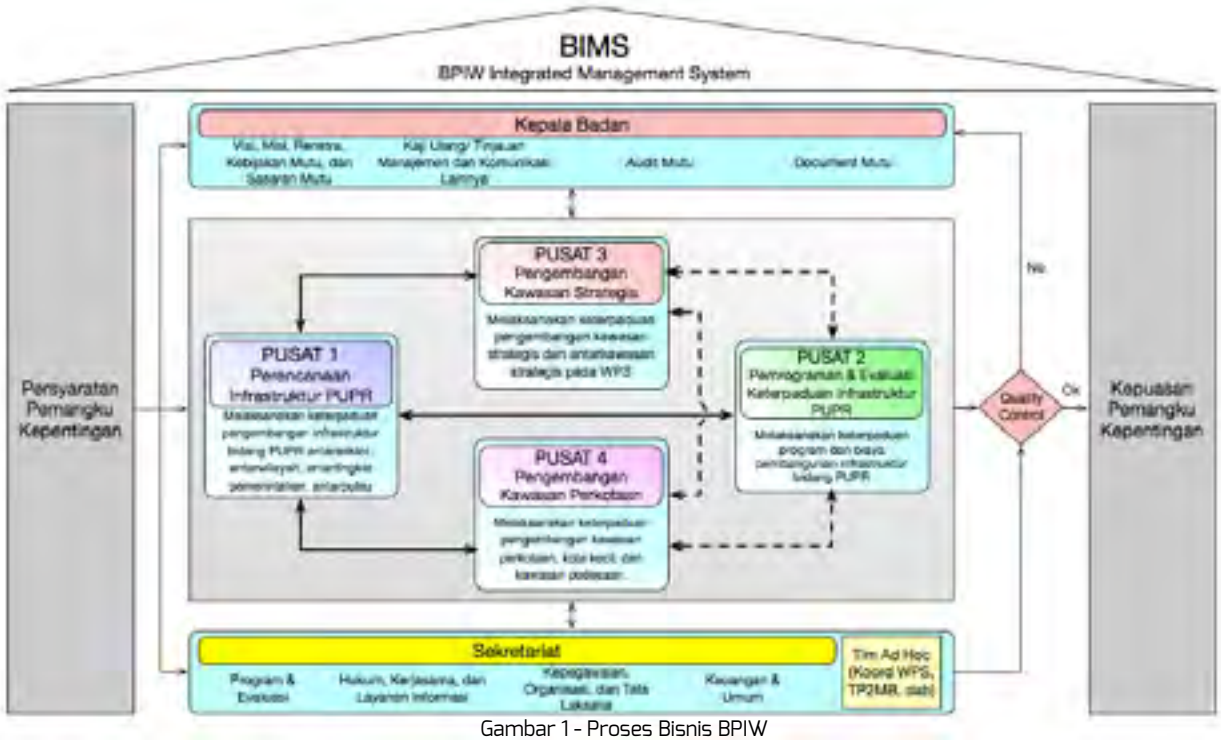

Gambar 1 - Proses Bisnis BPIW

Guna efisiensi dan efektifitas penerapan sistem yang ada di lingkungan BPIW, maka perlu dilakukan sistem manajemen terintegrasi yang disebut BPIW *Integrated Management System* (BIMS). Dengan sistem yang terintegrasi, pelaksanaan pekerjaan di lingkungan BPIW dapat bersinergi dengan lebih maksimal dan dengan demikian akan lebih mudah melakukan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan BPIW. Sebab semua proses bisnis, visi, misi, sasaran mutu semua eselon II dan eselon III di lingkungan BPIW mengacu pada eselon I dengan baik.

Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR (Pusat 1) BPIW akan menyampaikan kebijakan umum kepada Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (Pusat 3) dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan (Pusat 4) terkait dengan wilayah pengembangan strategis (WPS) dan pengembangan kawasan perkotaan yang akan dijadikan prioritas dalam bingkai Renstra.

Atas kebijakan tersebut, selanjutnya Pusat 3 menyusun rencana pengembangan (*development plan* atau DP) kawasan dan antar kawasan strategis. Demikian juga Pusat 4 juga akan menyusun *DP* untuk kota metro, kota besar, dan kota baru serta kawasan pedesaan. Produk *DP* tersebut bersama dengan rencana induk (*masterplan atau* MP) yang dimiliki oleh unor dilingkungan PUPR serta K/L terkait, akan dipadukan oleh Pusat 1 sehingga akhirnya akan menjadi rencana induk infrastruktur terpadu antarpulau. Setelah dilakukan beberapa pembahasan dan proses analisis lebih lanjut, maka akan dihasilkan rencana induk infrastruktur terpadu PUPR yang akan ditetapkan oleh Menteri PUPR sebagai acuan dalam pemrograman oleh unor di lingkungan PUPR.

Pemrograman ini akan dilaksanakan oleh Pusat 2 dengan menyusun program jangka pendek 3 tahunan yang selanjutnya akan dipertajam menjadi program tahunan sebagai bahan program arahan dalam forum pra-konreg. Untuk mewujudkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), maka peran Biro Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) akan memberi warna tersendiri dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-masing unor.

Setelah dilakukan beberapa pembahasan dan proses analisis lebih lanjut, maka akan dihasilkan rencana induk infrastruktur terpadu PUPR yang akan ditetapkan oleh Menteri PUPR sebagai acuan dalam pemrograman oleh unor di lingkungan PUPR.

Untuk melihat keterkaitan pekerjaan di antara eselon III yang ada pada masing-masing eselon II, maka dibuat alur kerja seperti salah satunya dicontohkan pada Gambar 2. Masing-masing unit eselon II wajib menjabarkan alur kegiatan (*work flow*) yang dibuat sedemikian rupa agar mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan serta dikendalikan dengan baik. Contoh tersebut digunakan pada Pusat 1 untuk mengelola kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Pengendalian mutu (*quality control*, QC) dilakukan untuk menjamin pekerjaan yang dihasilkan dengan baik.

Demikian untuk eselon II dan eselon III dibawahnya akan

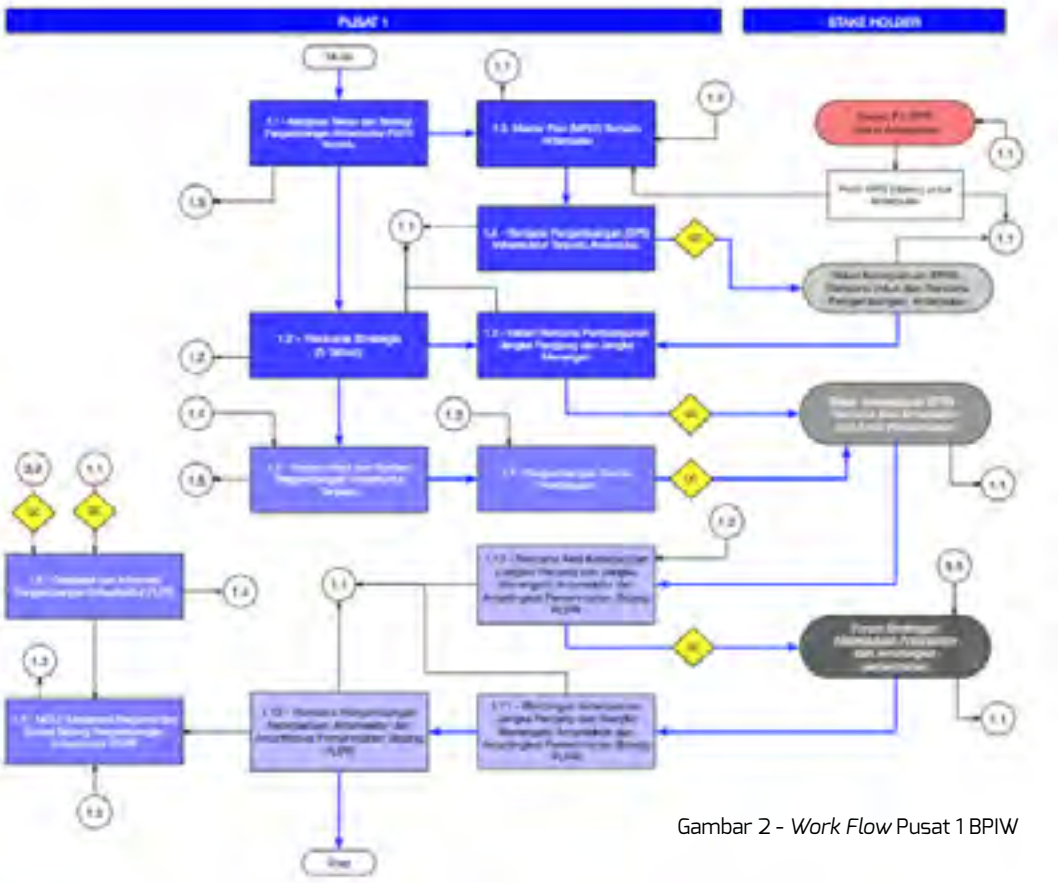

Gambar 2 - *Work Flow* Pusat 1 BPIW

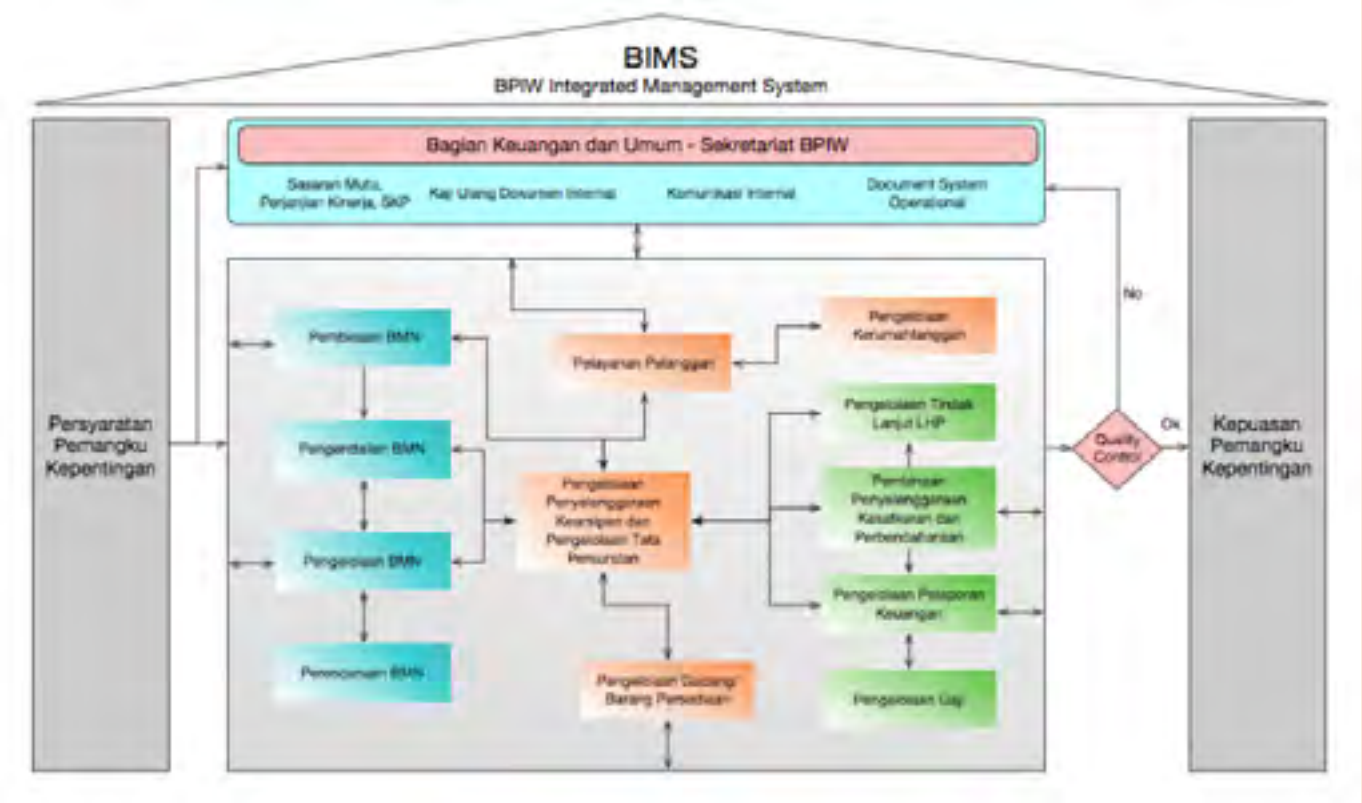

Gambar 3 - Proses Bisnis pada Bagian Keuangan dan Umum Sekretariat BPIW

menterjemahkan proses binsis tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya dan pada akhirnya untuk masing-masing eselon III akan menetapkan beberapa prosedur yang menjadi tanggung jawabnya dimana akan dibagi habis sesuai dengan proporsi minimal pegawai yang dimilikinya.

Masing-masing prosedur tersebut ditentukan penanggung jawabnya dengan baik, seperti contoh yang ditunjukkan pada Gambar 3, di mana dicontohkan pada Bagian Keuangan dan Umum sebagai administratur kegiatan dibantu oleh 3 orang penyelia akan bertanggung jawab untuk 12 pelaksana kegiatan yang melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan pada dokumen sistem mutu BPIW. Untuk melaksanakan kegiatan di bagian umum, maka diperlukan sasaran mutu, perjanjian kinerja, dan sasaran kinerja pegawai yang merupakan penjabaran pada eselon di atasnya. Beberapa tanggung jawab eselon III adalah melakukan kaji ulang dokumen internal, mengelola dokumen yang menjadi tanggung jawabnya, dan melakukan komunikasi internal agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Rekomendasi kedua yang perlu diperbaiki adalah terkait pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD). Sebenarnya FGD itu merupakan kunci dari pelaksanaan keterpaduan. Meski FGD beberapa kalangan menilai pelaksanaan FGD perlu dilakukan pengaturan, karena kurang menunjukkan sinergitas dan kurang efisien. Kualitas FGD harus ditingkatkan dari segi kualifikasi data maupun kesepakatan terkait pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan FDG dilakukan dengan koordinasi internal BPIW sehingga pelaksanaannya dapat digabungkan karena melibatkan pemangku kepentingan yang sama hanya pendalaman materi yang berbeda. Demikian juga koordinasi untuk menghindari pengambilan data yang berulang pada setiap pemangku kepentingan BPIW.

> Dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada, akan dikembangkan suatu pendekatan mekanisme kolaborasi bekerja *(works collaboration)* yang kemudian akan disebut dengan Sentra Keterpaduan Infrastruktur (SKIP) PUPR

Dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada, akan dikembangkan suatu pendekatan mekanisme kolaborasi bekerja (*works collaboration*) yang kemudian akan disebut dengan Sentra Keterpaduan Infrastruktur (SKIP) PUPR, dimana sentra ini merupakan sistem yang akan digunakan untuk melakukan kolaborasi kegiatan/ bekerja yang sifatnya internal BPIW dan eksternal, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Sentra ini akan dikelola oleh Sekretariat BPIW dan akan terdiri dari 3 buah simpul keterpaduan, yaitu Simpul keterpaduan PUPR yang digunakan untuk berkolaborasi/ bersinergi dengan Kementerian/ Lembaga yang menjadi pemangku kepentingan BPIW, Simpul keterpaduan BPIW yang akan digunakan untuk bersinergi di internal BPIW antar eselon II dan eselon III, dan terakhir adalah Simpul keterpaduan Informasi Publik BPIW yang digunakan untuk pemangku

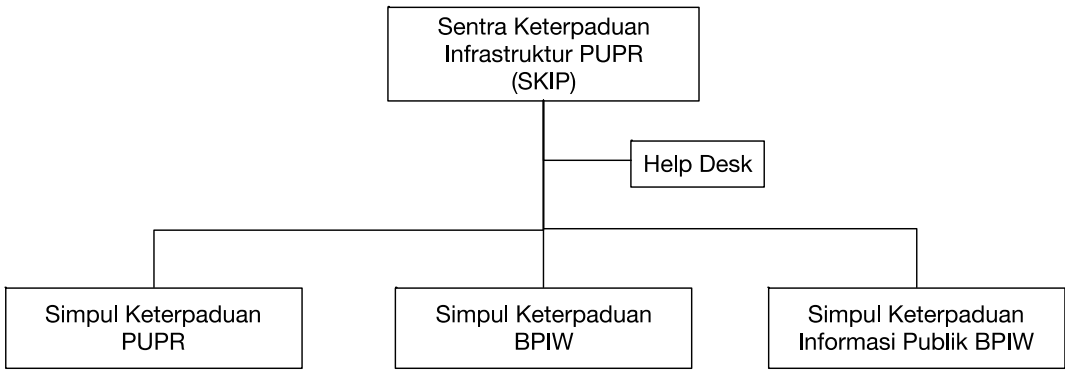

Gambar 4 - Struktur Sentra Keterpaduan Infrastruktur PUPR

kepentingan yang akan menggunakan informasi atau pengetahuan yang telah dikembangkan atau dihasilkan oleh BPIW.

Rekomendasi ketiga yang perlu diperbaiki lebih lanjut adalah pengelolaan aset, kearsipan, dan tata kelola komunikasi internal dan eksternal BPIW. Hal ini penting dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut nantinya. Data yang ada tersebut, sebagai modal dasar pada pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*). Hal ini penting, seperti yang disampaikan oleh Pak Dudung pada edisi Sinergi sebelumnya, bahwa *knowledge management* yang baik akan menghasilkan suatu organisasi pembelajaran (*learning organisation*) yang baik. Dimana organisasi tersebut mampu mengantisipasi perkembangan yang ada dan mencegah dari pada kesalahan yang berulang. Organisasi tersebut akan selalu berkembang. Pejabat ata pelaksana kegiatan yang mutasi atau pensiun, maka data atau pengetahuan yang ada tersebut juga tidak akan pindah atau pensiun. Pejabat atau pelaksana yang baru akan cepat menyesuaikan diri dengan baik dengan adanya dokumentasi pengetahuan yang baik.

Pendekatan dengan menggunakan konsep Sentra Keterpaduan Infrastruktur PUPR, dengan tahapan pelaksanaan yang ditunjukkan pada Gambar 5, dapat digunakan untuk kemudahan berkolaborasi dengan baik dan akhirnya dapat dengan cepat *'insight'* organisasi juga dengan baik. Pendekatan ini telah didukung pada BPIW karena sudah mempunyai *hardware* dan *platform* yang telah dimiliki pada waktu pengembangan *Situation Room* atau *ICT Room* yang terletak di lantai 3 Gedung Utama Kementerian PUPR yang sekarang telah digunakan sebagai *Situation Room* Menteri PUPR. Namun demikian tetap dibutuhkan dukungan dari Pusat Data dam Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR untuk dapat mengoptimalkan penggunaan *platform* yang sudah BPIW miliki tersebut.

Selain itu, dengan pendekatan Sentra ini, baik BPIW dan pemangku kepentingan terkait dapat bekerja dengan nyaman, karena kita sudah menyiapkan '*filing* kabinet virtualnya'. Nantinya kita mendorong bagian program dan bagian informasi untuk mengembangkan data tersebut menjadi informasi-informasi menjadi *knowledge*.
Demikian beberapa rekomendasi yang dihasilkan TP2MB, yang dapat digunakan sebagai *quick win* guna menunjang keberhasilan BPIW dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Hal ini menuntut BPIW harus selalu di depan memberikan dukungan kepada Menteri PUPR dalam memberikan kebijakan keterpaduan. BPIW bukan hanya sebagai kompiler program, tapi harus mampu menterpadukan program infrastruktur PUPR dengan efisien dan efektif. Jadi kita tidak menutup mata dan kita harus mengetahui apa kebutuhan dari para unor. Kita meyakini pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian PUPR dan juga pimpinan BPIW akan mendukung dan mendorong agar BPIW khususnya, dan umumnya Kementerian PUPR bisa lebih maju lagi di masa yang akan datang.

Gambar 5
Proses pada Kegiatan Sentra Keterpaduan Infrastruktur PUPR

RANGKAIAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI

Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019 - 2021 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR

"Tujuan pelaksanaan Rakor ini adalah a) konsolidasi program infrastruktur PUPR dengan program pemerintah di bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor, b) mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keterpaduan kebutuhan infrastruktur di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)."

KEPALA BPIW
Ir. Rido Matari Ichwan, MCP

Iwan Nurwanto

"Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek, dilakukan koordinasi secara intensif dengan berbagai pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah."

BAPPEDA & Dinas Bidang PUPR
34 Provinsi

BAPPEDA & Dinas Bidang PUPR
Kabupaten Kota

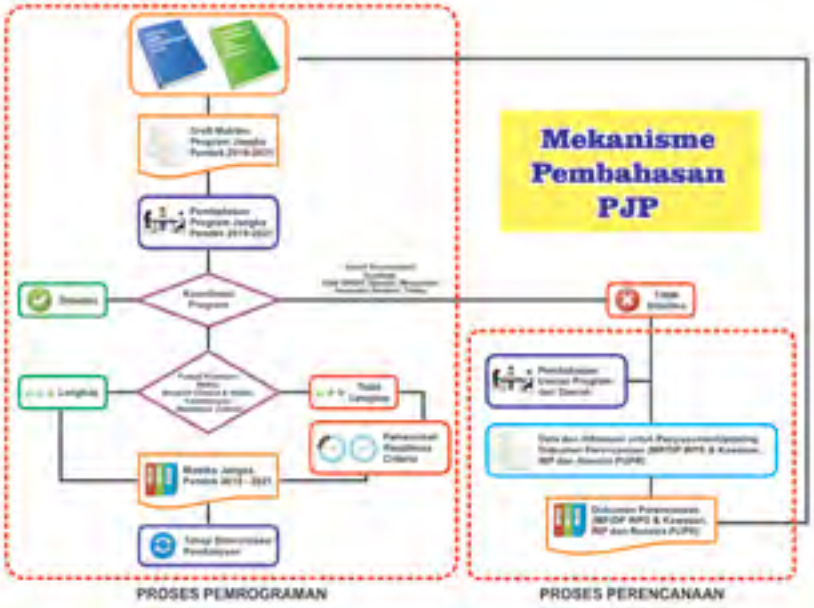

PROSES PEMROGRAMAN

PROSES PERENCANAAN

Mekanisme Pembahasan PJP

BATAM
Aceh 08 Mei 2017
Sumatera Utara 09 Mei 2017
Kepulauan Riau 10 Mei 2017

PADANG
Sumatera Barat 16 Mei 2017
Bengkulu 17 Mei 2017
Riau 18 Mei 2017

GORONTALO
Sulawesi Utara 22 Mei 2017
Gorontalo 23 Mei 2017

TARAKAN
Kalimantan Utara 12 Juni 2017
Kalimantan Timur 12 Juni 2017
Kalimantan Barat 13 Juni 2017
Kalimantan Tengah 13 Juni 2017

SEMARANG
Jawa Tengah 15 Juni 2017
Jawa Barat 16 Juni 2017

BANJARMASIN
Kalimantan Selatan 19 Juni 2017

SORONG
Papua 12 Juli 2017
Papua Barat 12 Juli 2017
Maluku 13 Juli 2017
Maluku Utara 13 Juli 2017

SURABAYA
Jawa Timur 17 Juli 2017
D.I Yogyakarta 17 Juli 2017
Banten 18 Juli 2017
DKI Jakarta 18 Juli 2017

MAKASSAR
Sulawesi Selatan 20 Juli 2017
Sulawesi Barat 20 Juli 2017
Sulawesi Tengah 21 Juli 2017
Sulawesi Tenggara 21 Juli 2017

LABUAN BAJO
Bali 28 Juli 2017
Nusa Tenggara Timur 28 Juli 2017
Nusa Tenggara Barat 28 Juli 2017

PALEMBANG
Bangka Belitung 31 Juli 2017
Sumatera Selatan 31 Juli 2017
Jambi 1 Agustus 2017
Lampung 1 Agustus 2017

Stakeholder Terkait

Ditjen Sumber Daya Air
Balai Besar Wilayah Sungai /
Balai Wilayah Sungai

Ditjen Bina Marga
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional /
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
SNVT P2JN Provinsi

Ditjen Cipta Karya
PPK Randal PIP Provinsi
Satker PAM Provinsi
Satker PKP Provinsi
Satker PBL Provinsi
Satker PPLP Provinsi

Ditjen Penyediaan Perumahan
SNVT PnP Provinsi

BPIW
Pusat Perencanaan Infrastruktur
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Copyright © 2017 Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Melukis Keindahan Pulau di Labuan Bajo

Destinasi wisata Labuhan Bajo, sudah sangat dikenal masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Daerah yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) ini juga disebut sebagai 'surga tersembunyi' setelah Raja Ampat. Bagaimana tidak, Labuhan Bajo yang berada di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 18 (Waingapu – Labuan Bajo - Ende - Maumere) yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur ini mempunyai berbagai destinasi pariwisata yang sangat indah untuk dikunjungi dan juga destinasi *diving* dan *snorkeling* terbaik di Indonesia.

Labuhan Bajo yang berada di Wilayah Pengembangan Strategis 18 (Waingapu – Labuan Bajo- Ende- Maumere) yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur ini mempunyai berbagai destinasi pariwisata yang sangat indah untuk dikunjungi

Pemerintah pun telah memasukkan Labuan Bajo menjadi salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang diprioiritaskan untuk dikembangkan, Berikut destinasi pariwisata yang dapat dikunjungi di Labuan Bajo diantaranya:

Pulau Komodo

Pulau Komodo ini merupakan salah satu dari 7 Keajaiban Dunia. Di pulau ini terdapat habitat asli dari komodo. Habitat komodo dilindungi pemerintah. Untuk itu pemerintah pusat menjadikan tempat hidup dari hewan langkah ini menjadi Taman Nasional Komodo. Secara administratif, pulau ini masuk dalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Komodo hidup dan berkembang biak dengan sangat baik, dimana pada Agustus 2009 saja, jumlah komodo mencapai sekitar 1.300 ekor. Sangat mengesankan bukan?. Selain komodo, di pulau ini menyimpan berbagai eksotisme anek flora dari mulai pohon kayu sepang dimana pohon ini dapat digunakan warga sekitar sebagai obat dan bahan perwarna pakaian, pohon notak juga diyakini sebagai obat dan bijinya sangat gurih dan enak seperti kacang polong. Disini kita juga bisa menikmati ekotisme pulau yang beranekaragam.

Gili Lawa Darat

Destinasi wisata kedua yang dapat dikunjungi adalah *trekking* di Pulau Gili Lawa. Gili lawa ini terbagi menjadi dua yakni Gili Lawa Darat dan Gili Lawa Laut. Gili lawa merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Gili lawa Darat adalah sebuah pulau di Timur laut Komodo, dimana pulau ini hampir terlihat sebagai padang pasir yang tandus yang seluruhnya ditutupi oleh rumput. Bila musim kemarau, pulau ini hampir terlihat coklat, sementara di musim penghujan berubah warna menjadi hijau. Gili lawa Darat ini merupakan tempat yang

sangat menarik dan biasanya digunakan sebagai tempat untuk kapal menginap di malam hari. Biasanya Gili Lawa Darat ini digunakan para wisatawan sebagai tempat untuk *trekking* matahari terbenam. Perlu waktu sekitar kurang lebih 20 menit untuk menuju puncak. Medan *trekking* pun cukup curam dan berbatu tajam. Sehingga perlu kesadaran diri cukup tinggi untuk naik ke atas. Akan tetapi di tempat ini, kita bisa mendapatkan salah satu spot foto terbaik di Labuan Bajo.

Pulau Rinca

Pulau Rinca merupakan pulau yang terletak di bagian barat Pulau Flores dan masih masuk dalam Kecamatan Komodo. Pulau ini merupakan satu dari dua pulau yang menjadi habitat kadal raksasa komodo, dimana secara geografis, pulau Rinca merupakan salah satu pulau yang masuk dalam Taman Nasional Komodo. Jarak yang ditempuh jika kita akan mengunjungi pulau Rinca ini adalah sekitar 2 jam dari Labuhan Bajo. Di pulau ini tersedia pilihan jalur *trekking* yaitu mulai dari *trekking* pendek, medium hingga yang panjang. Pengunjung bebas menentukan sendiri pilihan rute tersebut. Tentunya di sepanjang jalur *trekking*, pengunjung akan ditemani oleh pemandangan indah berupa jajaran perbukitan dan hamparan laut biru. Tidak hanya itu saja, di pulau ini juga hidup berbagai jenis binatang selain komodo antara lain babi liar, kerbau dan juga burung dan lain-lain. Biasanya hewan-hewan tersebut ada yang menjadi penyeimbang ekosistem dan juga sebagai mangsa komodo, sehingga mereka tetap bisa makan secara alami.

Pulau Padar

Pulau ini juga merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Pulau Komodo. Pulau ini merupakan pulau kosong dan tidak berpenghuni. Tidak ada satu bangunan pun disini. Daya tarik utama dari pulau ini adalah panorama tiga pantai yang dapat kita lihat sekaligus dari bagian puncak pulau. Namun untuk menuju puncak, tentunya harus melakukan *trekking* mendaki bukit padar yang beralaskan tanah berbatu dan medan nya yang terjal. Untuk menuju ke puncak, membutuhkan waktu selama 15 hingga 30 menit. Dari puncak padar kita dapat melihat keidahan yang luar biasa, hamparan bukit yang bercabang membelah lautan bahkan pulau padar merupakan salah satu destinasi andalan nusantara.

Sumber: Dok. BPIW/Indira

Wilayah Pengembangan Strategis 29
TERNATE – SOFIFI- DARUBA

ULTIMATE WPS 29 TERNATE – SOFIFI – DARUBA TAHUN 2025

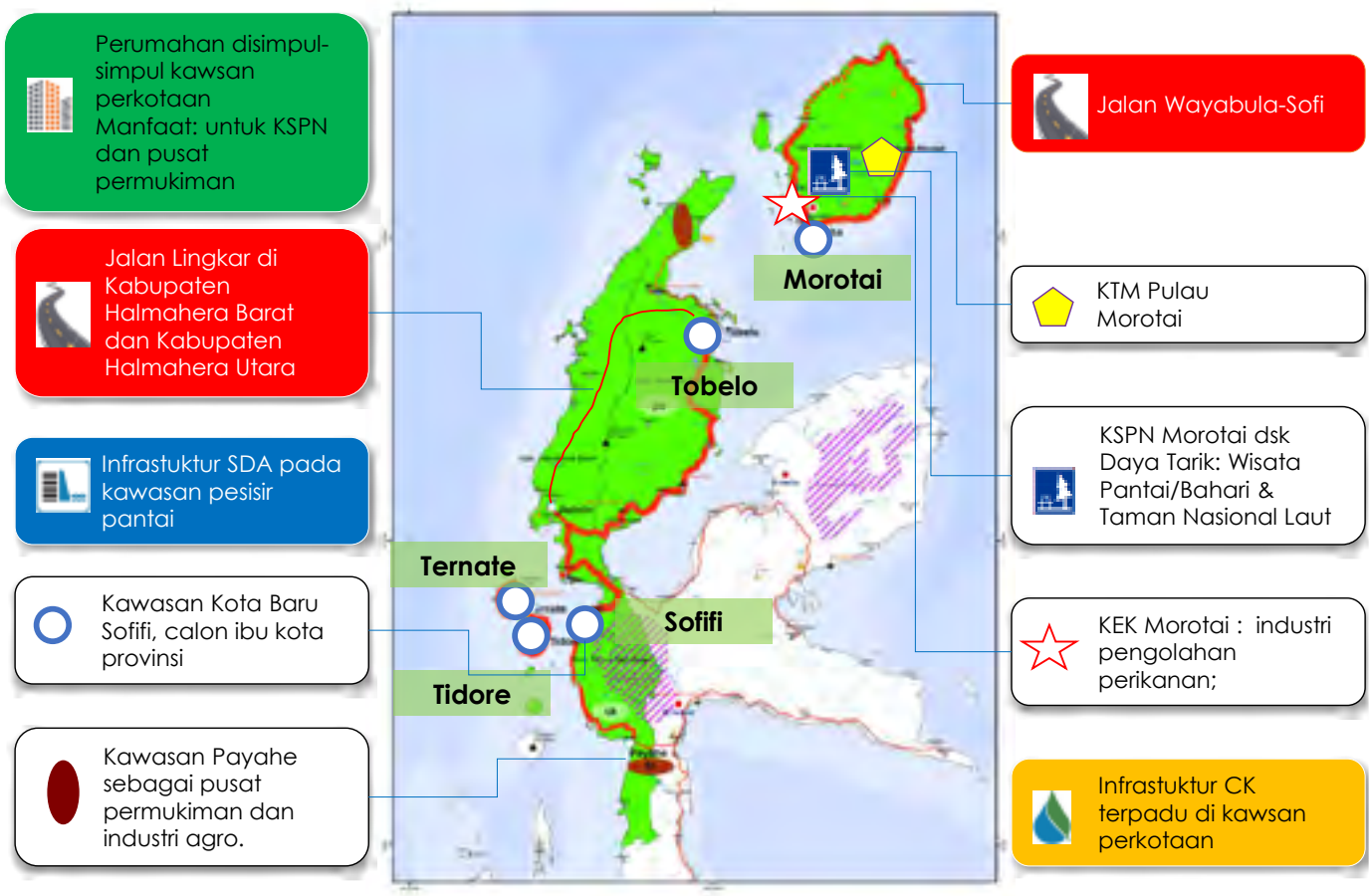

Ultimate:

Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai dengan tahun 2025 di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 29 yakni Ternate – Sofifi – Daruba diantaranya adalah Pembangunan Jalan Lingkar di kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, Pembangunan Jalan Wayabula – sofi. Bidang Sumber Daya Air terdapat pembangunan infrastruktur SDA pada kawasan pesisir pantai. Untuk Bidang Perumahan terdapat pembangunan perumahan disimpul – simpul kawasan perkotaan, Untuk bidang keciptakaryaan terdapat pembangunan infrastruktur Cipta Karya terpadu di kawasan perkotaan. Selain itu di WPS 29 (Ternate – Sofifi – Daruba), Kementerian PUPR mendukung pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Morotai, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai dan juga pembangunan kawasan Kota Baru Sofifi.

Program Utama:

Program Utama di WPS 29 ini meliputi pembangunan jalan, diantaranya pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Barat, pembangunan jalan Payahe – Dahepo – Saketa, pembangunan jalan Wayabula – Sofifi, dan juga pembangunan jalan Maba – Gotowase – Saged serta Gotowase – Bicoli – Tepeleo. Untuk Bidang Keciptakaryaan terdapat pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk Bidang Sumber Daya Air terdapat pembangunan Konstruksi Pengaman Pantai Jailolo.

Wilayah Pengembangan Strategis 30
AMBON – MASOHI

Ultimate:

Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai dengan tahun 2025 di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 30 Ambon-Masohi ini, diantaranya pembangunan Jalan Trans Maluku Ruas Lingkar Pulau Ambon, pembangunan Jalan Trans Maluku. Di bidang Sumber Daya Air terdapat pembangunan Embung di Kabupaten Maluku Tengah. Kementerian PUPR juga mendukung beberapa pembangunan infrastruktur, seperti Kawasan Industri (KI) Seram Bagian Barat, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kobisonta Kab. Maluku Tengah, pembangunan Bandara Pattimura dan juga Pelabuhan Yos Sudarso

Program Utama:

Program Utama di WPS 30 (Ambon – Masohi) antara lain pembangunan Jalan Trans Maluku Ruas Lingkar Barat Pulau Seram, Pelebaran Jalan Nasional Ruas Besi – Wahai, pelebaran Jalan Nasional ruas Saleman – Besi, Pelebaran jalan Nasional ruas Waipia – Saleman, dan juga pembangunan Jalan Trans Maluku ruas lingkar Pulau Ambon. Di bidang Sumber Daya Air terdapar pembangunan Embung di Kabupaten Maluku Tengah.

ULTIMATE WPS 30 AMBON – MASOHI 2025

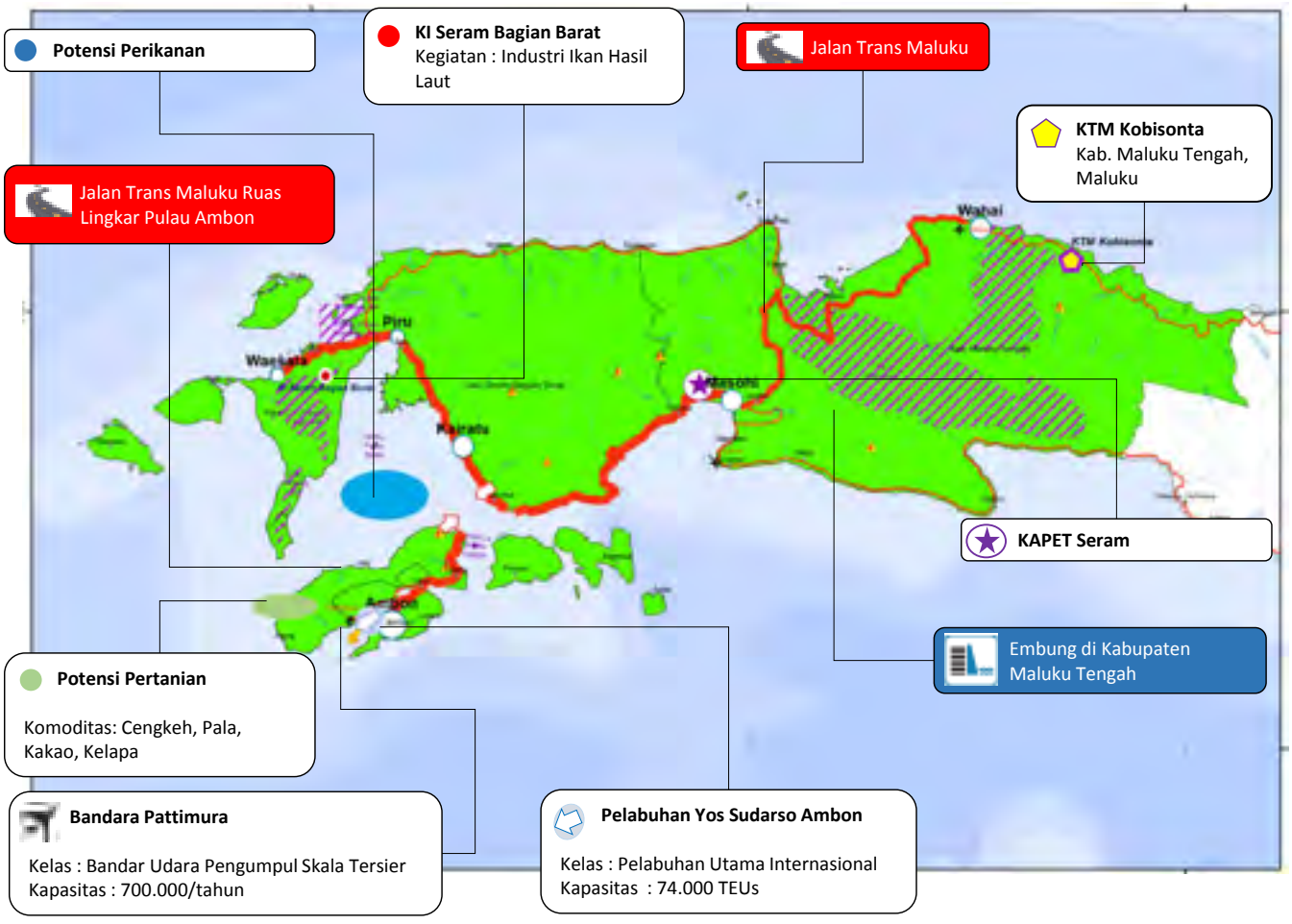

POMPA AIR TENAGA HIDRO (PATH)

Kemajuan teknologi terkait infrastruktur terus dikembangkan Kementerian PUPR melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Kali ini, Pusat Litbang Sumber Daya Air Balitbang mengembangkan Teknologi Pompa Air Tenaga Hidro (PATH), yang merupakan merupakan pompa air yang digerakan oleh tenaga putaran turbin penangkap tenaga air, tanpa melalui transformasi menjadi tenaga listrik.

Teknologi ini untuk memompa air tanpa listrik. Hal ini merupakan inovasi baru yang lebih efisien dari teknologi sebelumnya, dimana pada generasi pertama pompa air tenaga hidro, air yang dipompa diambil dari badan air setelah keluar dari turbin. Kelemahan dari versi ini adalah terjadi kehilangan energi setinggi muka air pengambilan sampai pompa (h).

Sedangkan pada versi PATH dilakukan inovasi, dimana dilakukan pengambilan air yang dipompa dari kolam penenang. Hal ini untuk mengurangi tinggi pemompaan dan pengambilan air menggunakan

Instalasi Pompa tenaga Hidrologi

Sumber: Balitbang PUPR

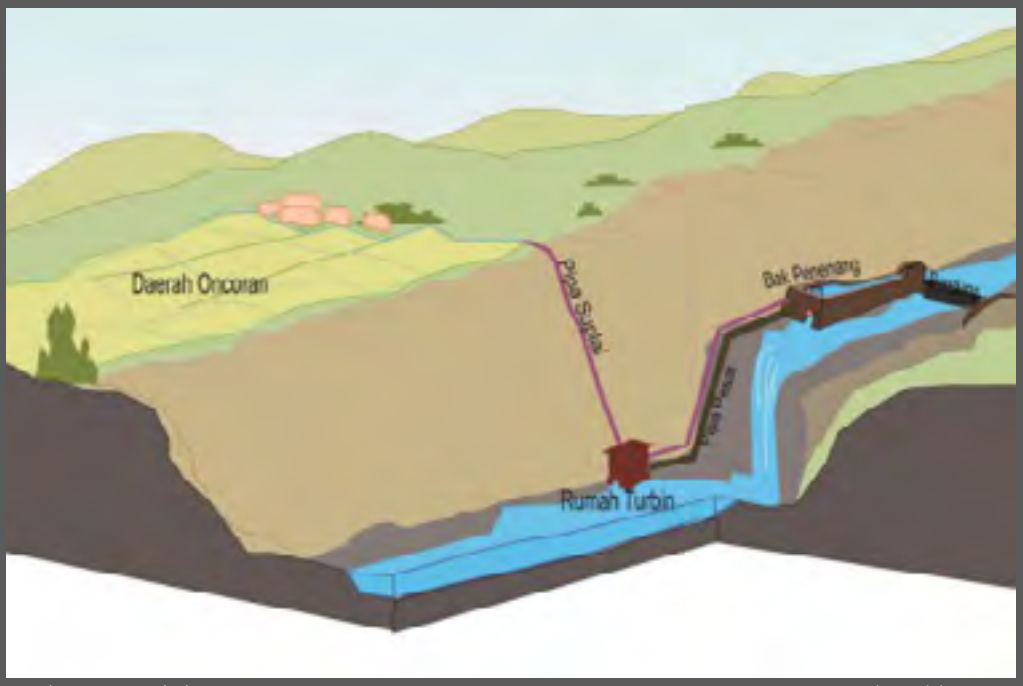

Site plan pompa Hidrologi

Sumber: Balitbang PUPR

Pada generasi pertama pompa air tenaga hidro, air yang dipompa diambil dari badan air setelah keluar dari turbin, kelemahan dari versi ini adalah terjadi kehilangan energi setinggi muka air pengambilan sampai pompa (h).

pipa yang dipasang pararel dengan pipa pesat. PATH ini merupakan generasi kedua dari teknologi tersebut, dan telah diterapkan di Colo, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Keuntungan PATH versi Colo ini bisa menghemat energi potensial untuk pemompaan dan lebih hemat biaya karena tidak memerlukan pipa pengambilan yang panjang. Keunggulan dari PATH yaitu tidak membutuhkan biaya energi untuk operasi, karena energi yang digunakan untuk menaikkan muka air merupakan energi akibat terjunan air itu sendiri dan kebutuhan biaya pemeliharan yang rendah.

Saat ini PATH juga telah diterapkan di Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di daerah tersebut, PATH digunakan untuk menyediakan air baku dengan memanfaatkan tenaga air sebesar 500 l/det dan tinggi jatuh 5 m untuk memutar turbin.

Hal ini berguna memompa atau menaikan debit air sebesar 50 l/ det dengan ketinggian 18 m serta debit 35 l/det dengan ketinggian 32 m dari Kali Lungge. Kali Lungge ini bermuara di Kali Jambe, anak Kali Progo yang berada di dalam wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Selanjutnya air yang dipompa digunakan untuk mengairi sawah seluas 36 hektar dan masih tersedia untuk pengembangan irigasi sawah seluas 25 hektar.

Keunggulan dari PATH yaitu tidak membutuhkan biaya energi untuk operasi, karena energi yang digunakan untuk menaikkan muka air merupakan energi akibat terjunan air itu sendiri dan kebutuhan biaya pemeliharan yang rendah.

Pompa tenaga Hidrologi

Sumber: Balitbang PUPR

Komisi V DPR Kunjungi Pembangunan Anjungan Cerdas

Dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur, transportasi dan pemberdayaan masyarakat desa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (11/7). Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah pembangunan Anjungan Cerdas yang merupakan proyek percontohan yang digulirkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan memaparkan rencana Pembangunan Anjungan Cerdas

Komisi V DPR RI mengamati maket rencana Anjungan Cerdas

Rido Matari paparkan skema Anjungan Cerdas

Rusun di Trenggalek juga ditinjau

Rapat Koordinasi Program Jangka Pendek di Labuan Bajo

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2019-2021, di Labuan Bajo NTT, 28 Juli lalu. Rapat pembahasan program pembangunan infrastruktur PUPR ini dibuka Kepala Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, Iwan Nurwanto dan dihadiri Wakil Bupati Kab. Manggarai Barat, Maria Geong. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut.

Pembukaan oleh Kepala Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Penyerahan Tanda Mata dari [illegible]

Narasumber Acara Rakor

Suasana Pembukaan Acara Rakor

Proses Pembahasan Program Jangka Pendek 2019-2021

Pameran Indonesia *International Smart City Expo and Forum*

BPIW Kementerian PUPR turut berpartisipasi pada Pameran Indonesia International *Smart City Expo and Forum*, yang berlangsung di Jakarta Convention Center, 12 hingga 14 Juli 2017 lalu. Berikut dokumentasi kegiatannya.

Booth BPIW Kementerian PUPR

Pengunjung antusias menyimak penjelasan dari petugas *booth*

Booth BPIW ramai di kunjungi masyarakat

Pengunjung menyimak cara mengikuti kuis

Panel BPIW

Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

BANG EGI

Kartunis: **Muhammad Nadjib**

8 Olahraga Ringan yang bisa dilakukan di Kantor

Kebanyakan dari kita kesulitan mendapat waktu yang tepat untuk berolahraga. Kita biasanya memilih berolahraga dengan terburu-buru pada pagi hari sebelum bekerja, atau berolahraga pada malam hari yang mengakibatkan kelelahan yang telah terakumulasi. Padahal sebenarnya olahraga pun bisa dilakukan sembari duduk di kantor lho. Selama delapan jam menghabiskan waktu untuk menganalisis, menatap layar komputer, berkomunikasi dengan klien, meyakinkan konsumen, atau berdiskusi dengan rekan kerja pastilah kelelahan mendera.

Anda tak perlu memaksaka diri untuk berolahraga sepulang dari kantor. Tak perlu memaksakan diri melakukannya karena ada olahraga yang bisa dilakukan sembari bekerja di depan meja. Ada sepuluh cara rahasia untuk menggerakkan tubuh saat bekerja tanpa diketahui oleh atasan.

1. Terlihat tetap bekerja seperti biasa
Sambil duduk di kursi, lakukan peregangan pada kaki. Naikkan kaki dari lantai hingga lutut lurus sempurna dan otot-ototnya berkontraksi. Ulangi dan lakukan beberapa kali. Dengan pengulangan yang cukup serta tambahan beban dari sepatu, paha pun akan mengencang. Kabar baiknya, orang lain tidak akan tahu apa yang terjadi di bawah meja kerja Anda.

2. Memperindah kaki saat antre
Ketika anda dalam antrean mesin fotokopi jangan hanya berdiri diam dan lakukanlah gerakan olahraga curian. Naikkan jari-jari kaki Anda. Saat tak ada orang yang melihat, turun dan naikkan selama 30 kali. Jika ada rekan kerja yang memergoki, tahan posisi Anda. Jika rutin melakukan gerakan itu, betis akan semakin rupawan, juga terlihat ramping dan seksi ketika menggunakan sepatu hak tinggi.

3. Menegakkan punggung
Latihan menegakkan posisi punggung adalah olahraga yang paling efektif dilakukan. Sembari mengetik laporan, jaga agar punggung tetap lurus, angkat lutut ke atas kursi, dan tahan hingga otot perut tak lagi dapat menahannya.

4. Pindah toilet
Dibanding berjalan sebentar untuk pergi ke toilet terdekat, cobalah untuk memilih toilet di lantai lain. Yang paling penting, jangan menggunakan lift atau perpindahan toilet tidak akan ada manfaatnya. Setiap tambahan tangga yang dilalui, semakin positif hasil yang didapat.

5. Peregangan tangan
Letakkan lengan anda di atas pangkuan, dengan satu telapak telungkup di atas telapak yang terbuka. Lengan harus membentuk garis lurus dari siku ke siku. Kemudian, geser sedikit kedua tangan, tekuk jari-jari, dan kunci jari-jari itu. Tarik sekuat mungkin tetapi usahakan agar ikatan jari-jari tidak lepas. Istirahat dan kemudian ulangi lagi. Latihan isometrik ini dapat memperkuat otot pada bahu, dada, bisep, dan trisep tanpa harus meninggalkan meja kerja.

6. Mendorong lengan
Tempatkan lengan anda di pangkuan dengan posisi kedua telapak tangan saling bertemu seperti berdoa. Kemudian, dorong kedua lengan secara bersamaan. Istirahat dan ulangi beberapa kali. Gerakan ini juga memberikan manfaat pada otot dada, bisep, dan trisep. Jika rutin melakukan gerakan ini, Anda mungkin tak lagi membutuhkan kartu anggota fitness.

7. Mengencangkan otot gluteus
Sembari duduk, mengencangkan otot gluteus tidak mustahil dilakukan. Caranya dengan menyilangkan sebelah kaki tanpa menimpa kaki di yang berada di bawah, kemudian tahan selama beberapa saat. Cara lain bisa dilakukan dengan menekan pantat sekuat mungkin. Meski demikian, jika rekan kerja di belakang Anda termasuk orang yang jeli, Anda harus lebih waspada.

8. Aktif saat istirahat makan
Ada banyak waktu yang tersisa saat istirahat makan siang. Dibandingkan anda membaca buku atau majalah di ruangan, lebih baik gunakan 40 menit pertama untuk berjalan di lingkungan sekitar gedung kerja. Kemudian, kembalilah ke kantor untuk makan siang sembari menikmati sisa waktu 20 menit.

DAPATKAN BUKU

SINKRONISASI PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK 2018 - 2020 KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN DENGAN INFRASTRUKTUR PUPR

DAPAT DIUNDUH DI Google Books

LANGKAH MENGUNDUH BUKU VIA WEBSITE:

1. Buka Link Google di www.books.google.com
2. Ketik "Sinkronisasi Program" pada kotak pencarian
3. Pilih Buku seperti diatas yang akan diunduh

LANGKAH MENGUNDUH BUKU VIA QR CODE:

1. Buka Aplikasi Scanner Barcode pada Smartphone
2. Scan Barcode diatas dan Pilih Open Link
3. Unduh Buku

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR

BIDANG
PENYUSUNAN PROGRAM

Bendungan Dongkrak Kemandirian Ekonomi

Bendungan merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi.

Dalam menunjang sasaran pembangunan nasional, antara lain meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi agar dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Rencana Pembangunan Menengah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggulirkan program pengembangan infrastruktur yang menunjang kedaulatan pangan, antara lain pembangunan 65 bendungan, pembangunan 1 juta hektare (Ha) irigasi baru, 3 juta Ha rehabilitasi irigasi serta pembangunan embung-embung untuk pengadaan air baku.

Selain itu, ada juga berbagai program pengendalian banjir, seperti normalisasi sungai atau pembangunan kanal banjir,
Bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke turbin sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air.

Berikut 10 Bendungan Terbesar di Indonesia
1. Bendungan Sigura-gura di Sumatera Utara
2. Bendungan Batutegi di Lampung
3. Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat
4. Bendungan Gajah mungkur di Jawa Tengah
5. Bendungan Karangkates di Jawa Timur
6. Bendungan Wonorejo di Jawa Timur
7. Bendungan Riam Kanan di Kalimantan Selatan
8. Bendungan Batujai di Nusa Tenggara Barat
9. Bendungan Tilong di Nusa Tenggara Timur
10. Bendungan Bili-Bili di Sulawesi Selatan

Bendungan Sigura-gura di Sumatera Utara

Bendungan Batutegi di Lampung

Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat

Bendungan Gajah mungkur di Jawa Tengah

Bendungan Karangkates di Jawa Timur

Bendungan Wonorejo di Jawa Timur

Bendungan Riam Kanan di Kalimantan Selatan

Bendungan Batujai di Nusa Tenggara Barat

Bendungan Tilong di Nusa Tenggara Timur

Bendungan Bili-Bili di Sulawesi Selatan

Dukung Pembangunan Infrastruktur Pendongkrak Ekonomi Masyarakat

Fary Djemy Francis

Ketua Komisi V DPR RI

Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Terutama, infrastruktur yang berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat.

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis mengungkapkan, salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat adalah Anjungan Cerdas.

> Menurut Fary, Anjungan Cerdas merupakan konsep baru yang patut dikembangkan sebagai sarana meningkatkan keamanan berkendara serta meningkatkan perekonomian di wilayah di sekitarnya.

"Pembangunan yang diinisiasi BPIW (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,-red) ini patut diapresiasi," terang Fary saat memimpin rombongan DPR RI meninjau langsung proses pembangunan Anjungan Cerdas di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Menurut Fary, Anjungan Cerdas merupakan konsep baru yang patut dikembangkan sebagai sarana meningkatkan keamanan berkendara serta meningkatkan perekonomian di wilayah di sekitarnya. Kendati begitu, Ia berharap, pembangunan Anjungan Cerdas perlu mengantisipasi potensi kemacetan.

Menurutnya, pembangunan Anjungan Cerdas menganut beberapa konsep. Pertama, dari hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR bahwa dalam perjalanan, seorang pengemudi memerlukan istirahat setelah mengemudi selama 4 jam berkendara.

Kedua, menurut Fary, Anjungan Cerdas juga mengembangkan konsep pengembangan wilayah strategis. Hadirnya Anjungan Cerdas di Kabupaten Trenggalek sebagai upaya pengembangan wilayah di sekitar Lingkar Wilis.

Anjungan Cerdas juga berfungsi sebagai rest areanya jalan nasional yang di dalamnya ada fasilitas untuk memasaran produk-produk lokal sebagai *showcase* atau contoh yang bisa dibelanjakan secara *retail*/grosir serta ruang informasi infrastruktur di wilayah sekitarnya.

Selain itu, Fary juga berharap proyek Bendungan Tugu di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek dapat selesai sesuai jadwal pada tahun 2019. Ia juga mendorong seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh, sehingga pembangunan Bendungan Tugu bisa diselesaikan dan dimanfaatkan dengan segera untuk kepentingan masyarakat umum.

"Melihat komitmen Pak Bupati Trenggalek yang memberikan jaminan untuk bisa mempercepat penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan lahan, kami yakin proyek ini selesai tepat waktu," ujarnya.

Ia juga meyakini bahwa Bendungan Tugu ini sangat penting bagi masyarakat Trenggalek maupun sekitarnya, terutama untuk pengairan, penanggulangan banjir, pembangkit listrik dan pariwisata.

(Daris/infoBPIW)

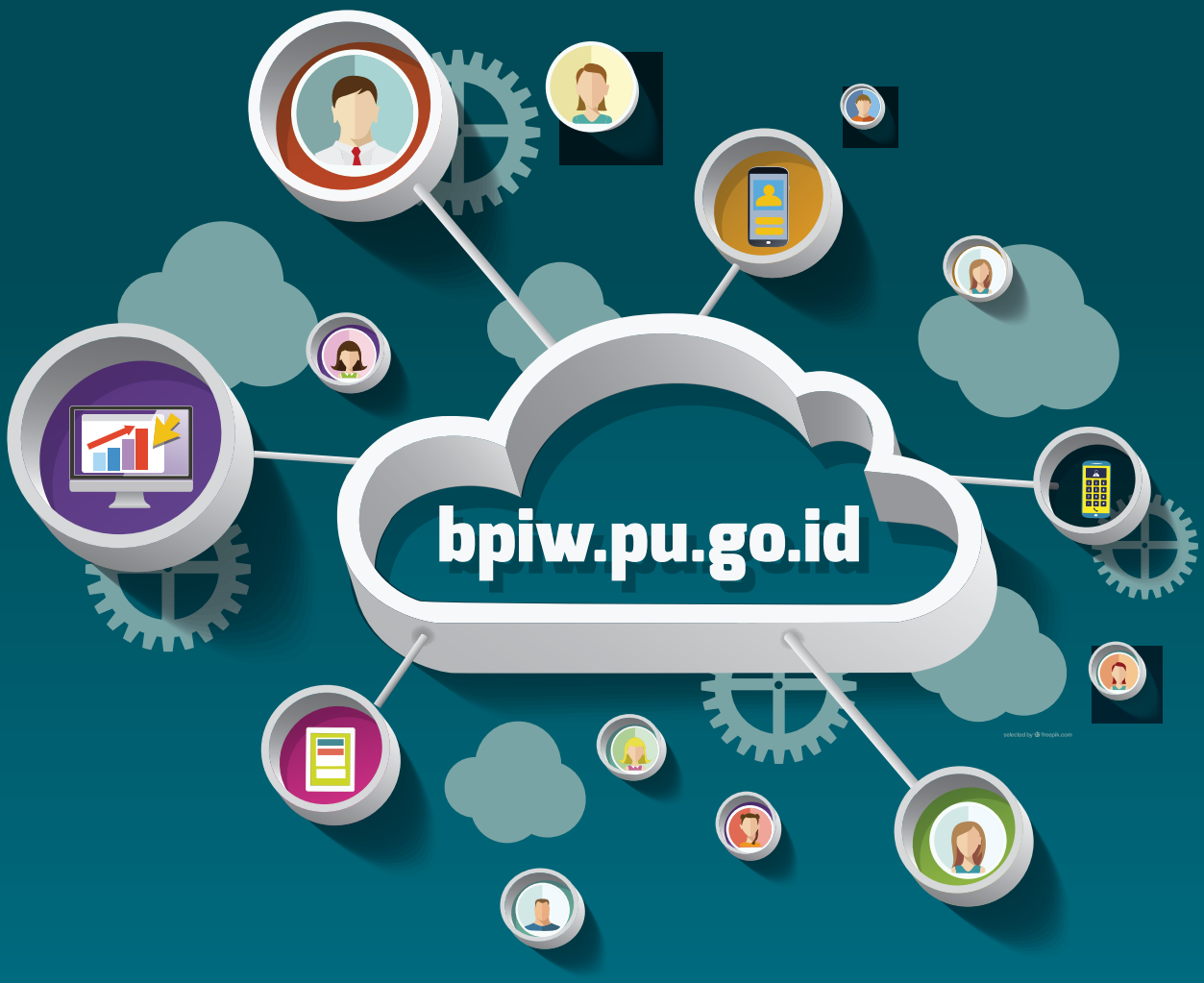

KUNJUNGI INFO BPIW DI WEBSITE & AKUN KAMI:

www.bpiw.pu.go.id

@informasiBPIW

@informasiBPIW

Layanan Informasi BPIW

BPIWkementerianPUPR

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR

Dirgahayu
Kemerdekaan Indonesia

INDONESIA
KERJA
BERSAMA

BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR